

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

**DINAS SOSIAL
PROVINSI BENGKULU**



**BANTU
RAKYAT**

**BENGKULU
BUMI MERAH PUTIH**

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berakhlak Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan
Berakhlak Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	10
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	36
BAB III Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan.....	39
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah dan Arah Kebijakan.....	39
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	42
3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.....	47
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.....	49
BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	52
4.1 Uraian Program.....	52
4.2 Uraian Kegiatan.....	53
BAB V Penutup.....	143

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.2.1	Jumlah Pegawai Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.....	21
Tabel 2.1.2.2	Jumlah Jabatan Struktural, Fungsional, Non ASN.....	19
Tabel 2.1.2.3	SDM Pada Bidang Pemberdayaan Sosial.....	22
Tabel 2.1.2.4	SDM Pada Bidang Rehabilitasi Sosial.....	23
Tabel 2.1.2.5	SDM Pada UPTD PSBR.....	23
Tabel 2.1.2.5	SDM Pada UPTD PSTW.....	23
Tabel 2.1.2.7	SDM Pada Bidang Penanganan Fakir Miskin.....	24
Tabel 2.1.2.8	SDM Pada Bidang Penanganan Bencana.....	24
Tabel 2.1.2.9	SDM Pada Sekretariat.....	24
Tabel 2.1.2.10	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.....	24
Tabel 2.1.2.11	Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Pimpinan.....	29
Tabel 2.1.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.....	31
Tabel 2.1.3.2	Realisasi Kinerja Bersumber APBN dan APBD 2021 s/d 2024.....	33
Tabel 3.1	Realisasi APBD Tahun 2021 - 2024.....	36
Tabel 3.2	Neraca Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024.....	37
Tabel 3.3	Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030.....	37
Tabel 2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Provinsi Bengkulu	38
Tabel 3.2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Serta Target Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029	45
Tabel 3.2.2	Keselarasan Renstra Dinas Sosial Dengan RPJMD Provinsi Bengkulu.....	46
Tabel 3.3.1	Penahapan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025 -2029	48
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu 2025-2029.....	52
Tabel 4.2	Program / Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.....	61
Tabel 4.3	Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan...	97
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	130
Tabel 4.5	IKU Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029.....	141
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci.....	142

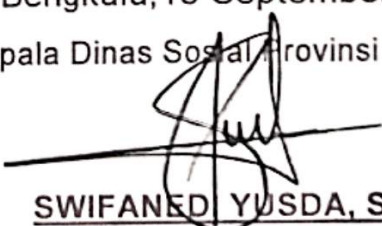
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran atas Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga dokumen Rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2025 - 2029 ini dapat diselesaikan setelah dilakukan evaluasi oleh Bappeda Provinsi Bengkulu. Rancangan akhir Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu ini menjabarkan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025 - 2029. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat penyusunan Renstra ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Gubernur sesuai visi dan misi yang ditetapkan pada awal masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan dapat dijadikan acuan utama bagi semua jajaran Dinas Sosial yang pada akhirnya mampu mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Penyusunan Rancangan Renstra ini kurang dari kata sempurna, untuk itu kami berharap semua pihak yang berkepentingan dapat memberikan saran dan arahan untuk kemajuan dimasa yang akan datang.

Bengkulu, 15 September 2025

Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu



SWIFANED YUSDA, S.Hut

Pembina TK.I

NIP. 197608152008041001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu instrumen terukur jangka menengah yang merupakan komitmen Organisasi Perangkat Daerah dalam mensinergikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Aparatur Pemerintah adalah penyusunan dan penetapan Rencana Strategis pada setiap Organisasi Perangkat Daerah. Secara konseptual, Rencana Strategis merupakan pernyataan langkah tindak terukur atas dasar rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja. Pernyataan indikatif terukur ini lahir sebagai respon terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang ditargetkan akan dicapai dalam 5 (lima) tahun dengan didukung oleh Sumber Daya yang tersedia, baik dana, peralatan maupun Sumber Daya Manusia.

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029, merupakan bentuk pengorganisasian secara komprehensif atas seluruh kegiatan dan proses dalam mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh tindakan dalam pencapaian visi dan misi organisasi dan RPJMD Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun ke depan dan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul yang secara formal memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD.

Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029 dilatarbelakangi oleh tuntutan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta upaya untuk turut mendukung pencapaian RPJMD dengan Visi yang diusung yaitu “ Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan “ . Selanjutnya dalam kaitan sistem keuangan keberadaan renstra Dinas Sosial menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA – DPA Dinas Sosial dimana substansi RKA/DPA tersebut akan tercermin pada APBD Provinsi Bengkulu.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni:

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD);
- b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD); dan
- c. Rencana pembangunan tahunan.

Renstra Dinas Sosial provinsi Bengkulu tahun 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Sosial RI dan RPJMD berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025 – 2029 berlandaskan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66)
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);

14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
15. Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pegemis.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
17. Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2025 Tentang Optimalisasi pengentasan kemiskinan
 29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 30. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan anak;
 31. Peraturan menteri Sosial nomor : 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan perizinan Pengangkatan Anak;
 32. Peraturan menteri Sosial Nomor 25 tahun 2017 tentang Lembaga konsultasi kesejahteraan Keluarga;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 34. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 tahun 2018 tentang standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota;
 35. Peraturan menteri Sosial nomor 28 tahun 2018 tentang Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan
 36. Peraturan Menteri Soaial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat

37. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2020 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
39. Peraturan menteri Sosial Nomor 9 tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna
40. Peraturan Menteri Sosial nomor 2 tahun 2025 tentang Keperintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
41. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi
42. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Sekolah Rakyat
43. Peraturan Menteri Sosial nomor 5 tahun 2024 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
44. Peraturan Menteri Sosial nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang
45. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah
46. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
47. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
48. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2025 mengatur tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
49. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029;
50. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

51. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan Dinas Sosial dalam jangka menengah. Renstra PD disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah yang digambarkan dalam bentuk program, serta sebagai acuan resmi bagi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029 adalah mendukung terwujudnya visi pembangunan Provinsi Bengkulu sebagaimana tertuang dalam RPJMD, yakni *“Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan”*. Renstra ini juga menjadi wahana untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang lebih adaptif, inklusif dan berbasis data sekaligus mewujudkan sinergi antara visi daerah dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029 *“Bersama Indonesia maju, Menuju Indonesia Emas 2045”*. Secara lebih rinci, penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029 bertujuan untuk :

1. Memberikan penjabaran visi misi Gubernur Bengkulu tahun 2025-2029 ke dalam strategi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu yaitu melalui penjabaran lebih lanjut ke dalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu 4 (empat) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

3. Sebagai acuan bagi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dalam penyusunan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif yang dituangkan dalam renja kerja Dinas Sosial.

Pada akhirnya, renstra Dinas Sosial 2025-2029 diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pembangunan daerah yang lebih profesional, partisipatif dan baeraya saing sehingga Provinsi Bengkulu dapat tumbuh menjadi daerah yang maju, religious, sejahtera dan berkelanjutan. Dokumen ini bukan sekedar pedoman teknis, melainkan juga menjadi instrument untuk mengukur kinerja, memperkuat koordinasi lintas sektor serta memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan nasional.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Sumber Daya Dinas Sosial, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD, dan penentuan isu-isu strategis.

BAB III Tujuan Dan Sasaran ,Strategi dan Arah kebijakan

Pada bab ini berisi tentang cascading perangkat daerah, tujuan ,sasaran ,rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah , Dinas Sosial Provinsi Bengkulu beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun serta

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Dinas Sosial Provinsi Bengkulu selama lima tahun kedepan.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

a. Tugas Pokok

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tipologi A, artinya memiliki peran strategis dan ruang lingkup yang luas. Dinas Sosial dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dinas Sosial dipimpin oleh Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah.

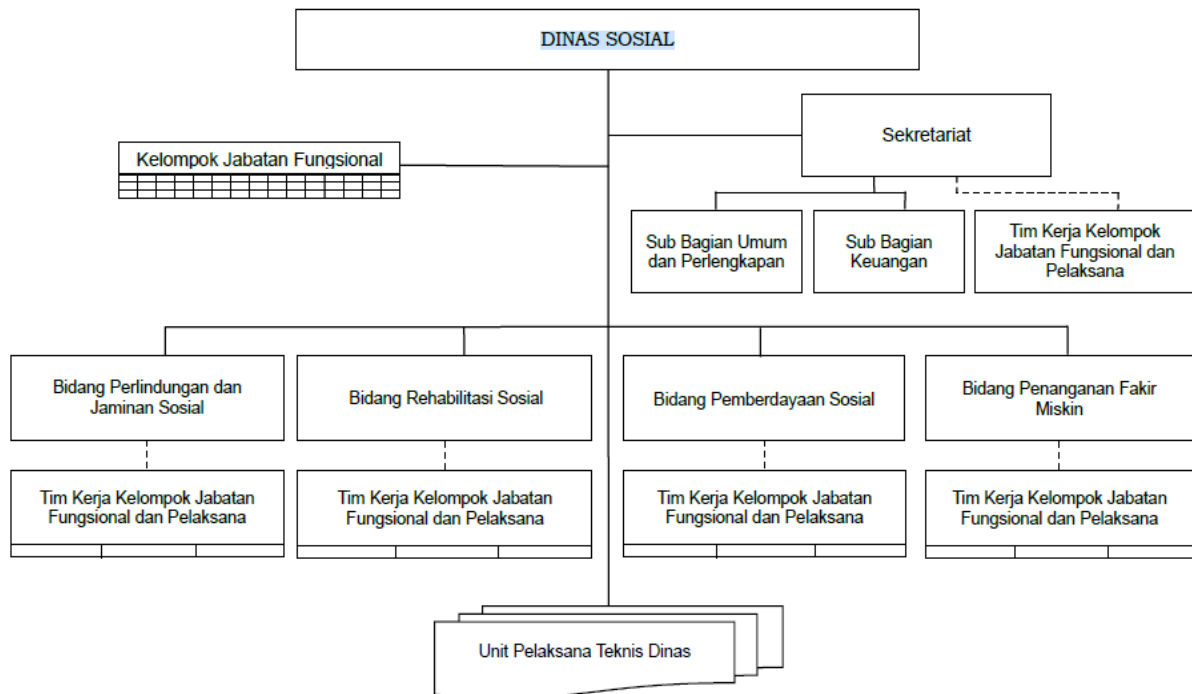
b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- (1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi soisal, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- (2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi soisal, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- (3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi soisal, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- (4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi soisal, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- (5) pelaksanaan administrasi Dinas;
- (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 tahun 2024 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :



Bahwa untuk kelancaran tugas dan untuk memperjelas tugas-tugas pejabat struktural pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu sebagai pelaksana dari Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 tahun 2024 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut diatas, kepala dinas dibantu oleh :

- (1) Sekretariat Dinas;
- (2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- (3) Bidang Rehabilitasi Sosial;
- (4) Bidang Pemberdayaan Sosial;
- (5) Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial

Sekretariat

Sekretariat Dinas Sosial mempunyai tugas mengarahkan penyusunan program kerja, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi, mengkoordinasikan pengidentifikasi produk hukum daerah serta menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Untuk melaksanakan tugas ,Sekretariat Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sekretariat;
- (2) penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas;
- (3) penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- (4) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas;
- (5) pelayanan informasi publik di bidang sosial;
- (6) pengkoordinasian proses identifikasi produk hukum daerah;

- (7) pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas;
- (8) mengikuti rapat-rapat kedinasan sesuai perintah atasan;
- (9) pengevaluasian pelaksanaan tugas Sekretariat;
- (10) penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- (11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Dinas

Sekretariat Dinas Sosial terdiri atas:

a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas mengelola administrasi persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- (2) pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
- (3) pengelolaan administrasi kepegawaian;
- (4) perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan, sarana dan prasarana pada Dinas Sosial;
- (5) pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
- (6) penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dinas;
- (7) pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Dinas;
- (8) pengumpulan data dan informasi dari bidang di Dinas;
- (9) pemutakhiran informasi publik di bidang sosial;
- (10) penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang sosial;
- (11) pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di bidang sosial;
- (12) mengikuti rapat-rapat kedinasan sesuai perintah atasan;
- (13) pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;

- (14) penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
- (15) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- (2) pengukuran rasionalisasi kebutuhan anggaran Dinas dalam mendukung pencapaian visi dan misi Dinas;
- (3) pengelolaan anggaran Dinas;
- (4) penatausahaan administrasi keuangan Dinas;
- (5) penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- (6) pelaksanaan rekap dan penyusunan laporan setoran Pendapatan Asli Daerah Dinas;
- (7) menghadiri rapat teknis keuangan sesuai dengan disposisi atasan;
- (8) pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- (9) penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; dan
- (10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Sekretariat Dinas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Tim Kerja Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana dibawah Sekretariat yaitu meliputi Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- 2) penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- 3) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- 4) penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- 5) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam, korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
- 6) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- 7) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- 8) pelaksanaan koordinasi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan instansi terkait;
- 9) menghadiri rapat teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- 10) pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 11) penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- 12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Dinas.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Tim Kerja Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana meliputi :

- Tim Kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
- Tim Kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
- Tim Kerja Jaminan Sosial Keluarga.

Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi sosial. Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi sosial;
- 2) penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi sosial;
- 3) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- 4) penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- 5) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- 6) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- 7) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;

- 8) pelaksanaan koordinasi Bidang Rehabilitasi Sosial dengan instansi terkait serta pelaksanaan kegiatan korban penyalahgunaan napza;
- 9) menghadiri rapat teknis rehabilitasi sosial;
- 10) pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial;
- 11) penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
- 12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Dinas.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Tim Kerja Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana meliputi:

- Tim Kerja Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia;
- Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
- Tim Kerja Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial;
- 2) penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial;
- 3) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial;
- 4) penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
- 5) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan sosial;
- 6) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial;
- 7) pelaksanaan koordinasi pemberdayaan sosial dengan instansi terkait;
- 8) pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial;

- 9) penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial; dan
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Dinas.

Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Tim Kerja Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud diatas meliputi :

- Tim Kerja Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
- Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial
- Tim Kerja Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin. Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- 2) penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- 3) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin;
- 4) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin;
- 5) penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin;
- 6) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan fakir miskin;
- 7) menghadiri rapat teknis penanganan fakir miskin;
- 8) pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- 9) penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin; dan
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Dinas.

Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan

fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Tim Kerja Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana meliputi :

- Tim Kerja Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
- Tim Kerja Penanganan Fakir Miskin Perkotaan; dan
- Tim Kerja Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar-Negara.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Panti Sosial Bina Remaja Harapan (PSBR)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Bina Remaja Harapan (UPTD PSBR) adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitative, ppromotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar, pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosalisasi bimbingan lanjut bagi anak terlantar, putus sekolah agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan yang berkedudukan di kota Bengkulu.

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Tresna Werdha (UPTD PSTW) adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentgk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bagr lanjut usia tedantar dan rawan terlantar agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Bengkulu.

UPTD mempunyai tugas membantu Kepata Dinas dalam melaksanakan sebagiankewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi Dinas dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah kewenangan Dinas. UPTD mempunyai fungsi :

- 1) persiapan kebijakan teknis operasional danl atau teknis penunjang sesuai dengan bidang tugasnya;
- 2) pelaksanaan pengk4iian dan analisis teknis operasional;
- 3) pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi;
- 4) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang masing-masing;
- 5) pelaksanaan administrasi masing-masing UPTD.

Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :

- a) UPTD PSTW Pagar Dewa terdiri atas:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan;
 4. Seksi Penyanhrnan;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b) UPTD PSBRH terdiri atas:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan;
 4. Seksi Penyantunan dan Penyaluran;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c). Kelompok Jabatan Fungsional
 1. Pekerja Sosial Pertama
 2. Pekerja Sosial Pelaksana
 3. Pekerja Sosial Muda
 4. Pekerja Sosial Madya
 5. Nutrisisionis ahli pertama
 6. Perawat Ahli Muda
 7. Instruktur Pelaksana lanjutan
 8. Penyuluh Sosial Pertama

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu agar dapat bekerja secara maksimal membutuhkan sumber daya yang cukup. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia aparatur dan sarana prasarana penunjang kegiatan.

Jumlah pegawai Dinas Sosial Provinsi Bengkulu sampai Agustus 2025 tercatat sebanyak 118 (seratus delapan belas) orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.2.1
Jumlah pegawai Dinas Sosial provinsi Bengkulu

1. KEADAAN PEGAWAI

NO	KUALITAS PENDIDIKAN	JML	GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV			
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1	SD	0				0												
2	SLTP	0																
3	SLTA	8					1	1		2	4							
4	D.1	0																
5	D.2	1									1							
6	D.3	6									1	2	3					
7	S.1/D.4	88									7	14	26	36	3	2		
8	S.2	14											2	6	5	1		
9	S.3	1														1		
JUMLAH		118	0	0	0	0	1	1	0	2	12	17	31	42	8	4	0	0

Tabel 2.1.2.2
Jabatan Struktural, fungsional, Non ASN

Jumlah

No	Uraian	Jumlah
1.	Jabatan Struktural : a. Eselon II b. Eselon III c. Eselon IV / Ketua Tim	1 orang 7 orang 19 orang
2.	Jabatan Fungsional : - Analis Kepegawaian Pertama - Analis Kepegawaian Muda - Instruktur Penyelia - Pekerja Sosial Ahli Madya - Pekerja Sosial Ahli Muda - Pekerja Sosial Ahli Mud - Penyuluh Sosial Ahli Pertama - Penyuluh Sosial Ahli Muda - Perawat Ahli Muda	1 orang 1 orang 1 orang 2 orang 19 orang 8 orang 2 orang 1 orang 3 orang

3.	Tenaga Non ASN : - Tenaga Harian Lepas • Kebersihan • Supir • Keamanan - Pendamping PKH - Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan - Pekerja Sosial Masyarakat - Tagana - Pelopor Perdamaian - karang taruna - Psikososial - Sakti Peksos	12 orang 1 orang 6 orang 465 orang 129 orang 1227 orang 425 orang 377 orang 1514 orang 10 orang 23 orang
----	--	--

Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tidak terlepas dari peran aktif sumber daya manusia yang dimiliki. Berikut rincian Sumber Daya Manusia seluruh Bidang/ UPTD :

Tabel 2.1.2.3
SDM Pada Bidang Pemberdayaan Sosial

No	Uraian SDM	Jumlah ASN							Total
		I d	III a	III b	III c	III d	IV a	IV b	
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial							1	1
2	Ketua Tim					2	1		3
3	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Pemberdayaan Sosial					4			4
4	Fungsional Pekerja Sosial Muda				2	2			4
5	Pengadministrasi Perkantoran pada Bidang Pemberdayaan Sosial	1							1
6	Pengadministrasi Umum					1			1
7	Fungsional Pekerja Sosial Madya						1		1
8	Penyuluh Sosial		1						1
9	Pengelola Data dan Informasi pada Bidang Pemberdayaan Sosial			1					1
	Jumlah	1	1	1	2	9	2	1	17

Tabel 2.1.2.4
SDM Pada Bidang Rehabilitasi Sosial

No	Uraian SDM	Jumlah ASN						Total
		I d	III a	III b	III c	III d	IV a	IV b
1	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial							
2	Ketua Tim				1		1	
3	Penelaah Teknis Kebijakan				1	3		
4	Fungsional Pekerja Sosial Muda				5			
5	Pengadministrasi Perkantoran					1		
6	Penyuluh Sosial		1					
	Jumlah		1		7	4	1	
								13

Tabel 2.1.2.5
SDM Pada UPTD PSBR

No	Uraian SDM	Jumlah ASN						Total
		I d	III a	III b	III c	III d	IV a	IV b
1	Kepala UPTD							
2	Kasubbag / Kasi				1	2		
3	Analisis Tata Usaha					1		
4	Fungsional Pekerja Sosial Muda					1		
5	Fungsional pekerja sosial pertama		1	1	1			
6	Instruktur pelaksana lanjutan				1			
7	Pekerja sosial pelaksana				1			
8	Perawat muda				1			
9	Penelaah Teknis Kebijakan					1		
10	Pengadministrasi persuratan			1				
	Jumlah		1	1	5	6		
								13

Tabel 2.1.2.6
SDM Pada UPTD PSTW

No	Uraian SDM	Jumlah ASN						Total
		I d	III a	III b	III c	III d	IV a	IV b
1	Kepala UPTD						1	
2	Kasubbag / Kasi			1		1	1	
3	Penelaah Teknis Kebijakan			1	1	4		
4	Administrasi perkantoran		1			1		
5	Pengelola data		1		1			
6	Fungsional pekerja sosial pertama			1	1			
7	Instruktur pelaksana lanjutan				1			
8	Pekerja sosial madya						1	
9	Perawat ahli muda					1		
10	Perawat muda					2		
11	Nutrisi ahli pertama			1				
12	Analisis tata usaha					1		
13	Penyuluh sosial			1				
14	Perawat ahli pertama				1			
	Jumlah		2	5	5	10	3	
								25

Tabel 2.1.2.7
SDM Pada Bidang Penanganan Fakir Miskin

No	Uraian SDM	Jumlah ASN						Total
		II b	III a	III b	III c	III d	IV a	IV b

1	Kepala Bidang						1	1
2	Ketua Tim			1	1			2
4	Fungsional Pekerja Sosial Muda			1				1
5	Fungsional Pekerja Sosial Pertama		2	2				4
6	Pranata Teknologi Informasi Komputer			1				1
7	Penelaah pengembangan usaha			1				1
8	Pengadministrasi umum		1					1
	Jumlah		3	6	1		1	11

Tabel 2.1.2.8
SDM Pada Bidang Penanganan Bencana

No	Uraian SDM	Jumlah ASN						Total
		II b	III a	III b	III c	III d	IV a	IV b
1	Kepala Bidang							
2	Ketua Tim					1	1	2
3	Penelaah Teknis Kebijakan			1	1	2		4
4	Fungsional Pekerja Sosial Madya						1	1
5	Fungsional Pekerja Sosial Muda				2	2		4
6	Fungsional pekerja sosial pertama			2				2
	Jumlah			3	3	5	2	13

Tabel 2.1.2.9
SDM Pada Sekretariat

No	Uraian SDM	Jumlah ASN						Total
		II b	III a	III b	III c	III d	IV a	IV b
1	Kepala Dinas						1	1
2	Sekretaris						1	1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan					1		1
4	Kepala Sub Bagian Keuangan					1		1
5	Ketua Tim PEP					1		1
6	Pengadministrasi perkantoran			1		1		2
7	Pengadministrasi kepegawaian					1		1
8	Pekerja sosial		2					1
9	Pekerja sosial muda				1	1		2
10	Pekerja sosial madya						1	1
11	Penyuluh sosial		2					1
12	Penyuluh sosial muda				1			1
13	Penelaah Teknis kebijakan			1	2	6		9
	Jumlah		4	2	4	12	1	25

Tabel 2.1.2.10
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak Berat
Alat Kesehatan Perawatan Lain-lain		1	1	
Mesin Jahit		1	1	
Piring / Gelas / Mangkok / Cangkir		2		2
Alat pemadam kebakaran lain-lain	Lokal	2		2
Alat Dapur Lain-lain	Sanyo	1		1

Mesin Cuci	Gold Star	1		1
Mesin Ketik Manual Standar	Toa	1		1
Mesin Jahit	Singer	17		17
Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	Sthil	1	1	
Alat Potong Rumput Listrik	Wahl	2	2	
High Presure Cleaner	Karcher	1		1
Kunci Khusus Untuk Alat Besar Darat		1		1
Mesin Bor		1		1
Mesin Cuci	Sharp	2	1	1
Mesin Jahit	Juki	4	4	
Mesin Kompresor	Sharp	2		2
Mesin Potong Rumput	Sthil	7	6	1
Steam Cleaner	Deruci	1		1
Nurse Set		5	5	
AC Unit	Panasonic	1	1	
Printer		5	5	
Solid e Projector		1	1	
Televisi		5	5	
Kamera Digital	Canon	1		1
AC Split	Hisense	1		1
AC Split	Toshiba	1		1
AC Split	LG	7		7
AC Split	Panasonic	6	6	
AC Split	Daikin	1	1	
Amplifier	Sice	1		1
Camera Film	Sice	1		1
Note Book	Toshiba	4		4
P.C Unit	Acer	1		1
Printer		2		2
Printer	Canon / Pixma	4		4
Printer	Canon	9	2	7
Printer	Samsung	1		1
Printer	Epson	28	20	8
Printer	Laser Jet Canon	10	10	
Sound System	Toa	1		1
Televisi	Sony	1		1
AC Split	LG	5		5
AC Split	Sharp	2	2	
AC Split	TCL	4	4	
AC Split	Panasonic	2	2	
AC Split	Sharp	2	2	
AC Unit	LG	5		5
AC Unit	Polytron	1	1	
Camera Digital	Canon DSRL	1	1	

Camera Film	Canon	1		1
Lap Top	Acer	1		1
Lap Top	Apple MacBook	1	1	
Lap Top	Ryzen	1	1	
Mesin Fax	Panasonic	1	1	
Note Book	Lenovo	3	3	
Note Book	Sony	1		1
Note Book	Toshiba Stelitle	1		1
Note Book	Acer	2		2
Note Book	Lenovo	5	5	
Note Book	Spc X1	20	20	
Peralatan Las Lain lain	Black Rhino	2		2
Personal Komputer	Asus	1	1	
Printer	Canon MP237	6		6
Proyektor Atthacmen	GTC	1	1	
Scaner	Compact	3	3	
Sound System	Sound System	1	1	
Sound System	Crimson	1	1	
Sound System	Yamaha	2		2
Televisi	LG	2	2	
Televisi	Sharp	10		10
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Avanza / Veloz 1500 cc New	1	1	
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Isuzu / Damia	1		1
Sepeda Motor	Honda Win / MCB	3		3
Sepeda Motor	Kawasaki / KLX 150	1	1	
Mini Bus	Toyota New Fortuner	1	1	
Minibus	Suzuki	3	3	
Minibus	Terios / X MT Extra	2	2	
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Isuzu Panther	3		3
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota Kijang	2		2
Sepeda Motor	Honda / NF 100	1	1	
Sepeda Motor	Honda Win / MCB	1		1
Sepeda Motor	Suzuki / A100	1		1
Sepeda Motor	Yamaha Alpha	1		1
Sepeda Motor	Yamaha YT / 115	2		2
Scaner	Brother Mobile	1	1	
Sepeda Motor	Honda Supra X 125	135	135	
Sepeda Motor	Suzuki Smash	1		1
P.C Unit	Canon / MX 366	3	2	1
Lap Top	Dell V300	3	3	
P.C Unit	Hp	2	2	

Ampilifiler	Dat	3		3
Karaoke	Polytron	1		1
P.C Unit	Samsung	5		5
Pesawat Telephone	Polytron	1		1
Wireless	Toa	2		2
Wireless	Dat	2		2
Ases Split		4	4	
Desktop	LG	1		1
Filing Besi Mental	Yunika	4	4	
Handy Cam	Sony / DCR	1		1
Handy Cam	Sony / SX21 E	1		1
Handy Talky	Icome / V80	10		10
Handy Talky	Icom	4		4
Kursi Roda	Chorona	10	10	
Lap Top	Hp Presario / Core I3-3230	4		4
Lap Top	Zyrex	1		1
lap top	Asus core i3	1	1	
lap top	Lenovo	7	7	
Megaphone	Targa	1	1	
Overhead Projektor	Optomo / ES 526	1		1
P.C Unit	Asus Desktop	2	2	
P.C Unit	Lenovo	7	7	
Papan Visuil		1	1	
Proyektor	Infocus	1	1	
Tangga Aluminium	Lokal	1	1	
Tangga Alumnium	Talux	1		1
Kursi Kerja Pejabat Eselon III		3	3	
Meja Kerja Pejabat Eselon III		1	1	
Meja Komputer		2		2
Kasur	Stary Foam	50		50
Tempat Tidur Besi / Metal	Romeo / Single	10		10
Lemari Es	Gold Star	2		2
Lemari Es	Sharp	1		1
Meja Kayu / Rotan	Lokal	3	3	
Sofa	Sice	8		8
Tempat Tidur Kayu lengkap	Lokal	3		3
Kasur		35	25	10
Kursi Besi / Metal	Fortuna	29	29	
Kursi Lipat		10		10
Kursi Putar	Subaru	5	5	
Kursi Rapat	Polaris	50	50	
Kursi Tamu	Lokal	5	5	
Lemari Arsip	Lokal	2	2	
Lemari Arsip	Lokal 2 Pintu	3	3	

Lemari Besi	Yunika / B-44	9	4	5
Lemari Es	Sharp	3	1	2
Lemari Kayu	Lokal	7	7	
Lemari Pakaian	Club Kely	20	20	
Lemari Pakaian	Jasmine	19		19
Meja Biro	Lokal	7	7	
Meja Kerja	Lokal	9	9	
Meja Rapat	Lokal	10	10	
Meja Tamu Ruangan Biasa	Lokal	1	1	
Tempat Tidur Kayu		10	10	
Mesin Penghisap Debu	Ucida	1		1
Alat Penghancur Kertas	Noiselevel 69 DB	2		2
Alat Rumah Tangga Lain-lain	Dat	4		4
Dispenser	Ucida	1		1
Alat Penghancur Kertas	Secure	4		4
Exhaust Fan	Maspion	2		2
Kipas Angin	Cosmos	2	2	
Kipas Angin	Panasonic	6		6
Kipas Angin	Krisbow	1	1	
Kipas Angin	Miyako	5		5
Mesin Pompa Air	Selva	2		2

Tabel 2.1.2.11**Pengawai yang telah mengikuti pelatihan pimpinan**

No	Nama pelatihan/Perjenjangan	Total
1.	PIM II	1 orang
2.	PIM III	3 orang
3.	PIM IV	17 orang
4.	Diklat Fungsional	28 orang
5.	Diklat PPNS	1 orang
6.	Diklat Basic Trauma Cardio Life Suport	1 orang
7.	Diklat Pranata Komputer	1 orang
8.	Diklat Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	1 orang
9.	Diklat Dietec Update	1 orang

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, dimana pelayanan dasar bidang sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.

Penerapan SPM bidang Sosial dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2028 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial

- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Adapun jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) :

- | | |
|--|---|
| 1. Anak balita terlantar | 14. Kelompok minoritas |
| 2. Anak terlantar | 15. Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP) |
| 3. Anak yang berhadapan dengan hukum | 16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) |
| 4. Anak jalanan | 17. Korban penyalahgunaan NAPZA |
| 5. Anak dengan disabilitas (ADK) | 18. Korban trafficking |
| 6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan | 19. Korban tindak kekerasan |
| 7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus | 20. Pekerja Migran bermasalah sosial (PMBS) |
| 8. Lanjut usia terlantar | 21. Korban bencana alam |
| 9. Penyandang disabilitas | 22. Korban bencana sosial |
| 10. Tuna Susila | 23. Perempuan rawan sosial ekonomi |
| 11. Gelandangan | 24. Fakir miskin |
| 12. Pengemis | 25. Keluarga bermasalah sosial psikologis |
| 13. Pemulung | 26. Komunitas adat terpencil (KAT) |

Adapun pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Provinsi Bengkulu beserta target dan capaian realisasinya dapat dilihat pada Tabel 2.1.3 sebagai berikut :

Tabel 2.1.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / sasaran	2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R
1	Tujuan: Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang mendapatkan manfaat pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial	69,9	79,9	70,5	79,3	71,2	81,6	76,5	76
1.1	Sasaran : Meningkatnya Penanganan permasalahan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	69,9	79,9	70,5	79,3	71,2	81,6	76,5	76
1.2	Sasaran : Meningkatnya Kapasitas PSKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Presentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	55	52,25	53	57	56	52,7	56	59,97
2	Tujuan: Meningkatnya capaian kinerja OPD	Nilai SAKIP Dinas Sosial								
2.1.	Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	Nilai SAKIP Dinas Sosial	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Capaian sasaran meningkatnya penanganan permasalahan sosial

Dari tabel diatas dapat kita lihat pada sasaran meningkatnya penanganan permasalahan sosial pencapaian target sasaran melebihi target (lebih dari 100%) sejak tahun 2021. Pencapaian pada sasaran tersebut didukung beberapa program , diantaranya program yang menangani SPM bidang sosial yaitu :

1) Program Rehabilitasi sosial

- Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial. Pada tahun 2024 layanan tersebut mencapai 100 % yang mengacu pada panti / lembaga milik masyarakat dibawah kewenangan provinsi melalui dana APBD OPD
- Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial. Pada tahun 2024 layanan tersebut mencapai 82,6 % yang mengacu pada panti milik Dinas Sosial Provinsi Bengkulu melalui dana APBD OPD. Tidak tercapainya target dikarenakan Adanya anak asuh yang di jemput kembali oleh keluarganya dengan alasan sudah mampu dan anak asuh telah selesai menyelesaikan pendidikan.

- Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial. Pada tahun 2024 layanan tersebut mencapai 87,5 % yang mengacu pada panti milik Dinas Sosial Provinsi Bengkulu melalui dana APBD OPD. Tidak tercapainya target dikarenakan kembali ke keluarga inti karena permintaan keluarga.
- Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial. Tahun 2024 Dinas Sosial bekerjasama dengan pihak terkait seperti Baznas dalam pemulangan kedaerah asal, sehingga kinerja SPM terlaksana.
- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi. Tahun 2024 capaian kinerja sebesar 100 %.

2). Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pada program ini capaian kinerja Dinas Sosial bersumber dari program APBN dan APBD, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako sedangkan tahun 2024 melalui APBD Dinas Sosial Provinsi Bengkulu melaksanakan program Kartu Bengkulu Sejahtera (KBS) ,Gas LPG 3 Kg bagi keluarga miskin dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan. Melalui program APBN Dinas Sosial Provinsi Bengkulu melakukan secara berkala monitoring ke Kabupaten/Kota kepada penerima manfaat. Capaian kinerja yang didapat didukung juga melalui kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal sebesar 96,3 %. Dengan demikian, dapat mendorong capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. Berikut rincian bantuan sosial :

Tabel 2.1.3.2
Realisasi kinerja bersumber APBN dan APBN tahun 2021 s/d 2024

Program	Realisasi Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Program Keluarga Harapan	84.468 KK	82,992 KK	73,633 KK	91,114 KK
Sembako	96.762 KK	145,278 KK	111,982 KK	
Bantuan sosial dalam masa PPKM darurat	44,768 KK	-	-	-
Bantuan pangan non tunai dimasa PPKM	37,405 KK	-	-	-
KBS	-	588 KK	990 KK	2500 KK
Gas LPG 3 Kg	-	-	1000 KK	-
BPJS Ketenagakerjaan	-	-	39,487 OB	39,487 orang

Sasaran meningkatnya kapasitas PSKS dan lembaga kesejahteraan sosial

Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kapasitas PSKS dan lembaga kesejahteraan sosial didukung program Pemberdayaan Sosial. Program Pemberdayaan Sosial adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan individu, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah sosial melalui pelatihan, pendampingan dan penguatan potensi agar mampu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup. Tahun 2024 capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu 59,97 % melalui peningkatan potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat dan Kelembagaan masyarakat.

Sasaran Meningkatnya Capaian Kinerja OPD

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu menunjukkan peningkatan nilai akuntabilitas kinerja sebesar 0,25. Nilai akuntabilitas kinerja tahun 2023 sebesar 76,70 atau berpredikat BB (sangat baik) dan tahun 2024 sebesar 76,95 atau berpredikat BB (sangat baik) dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Komponen yang dinilai	Tahun 2023	Tahun 2024
1,	Perencanaan kinerja	22,50	22,40
2.	Pengukuran kinerja	22,50	24
3.	Pelaporan kinerja	11,70	12
4.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	20	18,75
	Nilai hasil evaluasi	76,70	76,95
	Tingkat akuntabilitas kinerja	BB	BB

Pada tabel diatas dapat lihat berdasarkan komponen, terdapat nilai yang turun seperti perencanaan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hal ini disebabkan pengumpulan data kinerja capaian belum memanfaatkan teknologi (aplikasi) dan belum tepat waktu dalam mengupload dokumen pada e-SAKIP. Sedangkan untuk evaluasi akuntabilitas kinerja , disebabkan belum sepenuhnya hasil rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti.

Capaian kinerja yang mendukung tujuan,sasaran Dinas Sosial Provinsi Bengkulu didukung anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi APBD tahun 2021 -2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah		1.800.000	5.400.000	1.500.000	1.250.000
	B. Pendapatan transfer					
	C. Lain lain pendapatan daerah yang sah					
	JUMLAH		1.800.000	5.400.000	1.500.000	1.250.000
2	BELANJA					
	A. Belanja Operasi		17.852.055.133	19.216.934.330	21.410.206.928	22.407.093.155
	B. Belanja Modal		99.019.292	126.521.000	68.100.000	256.800.000
	C. Belanja Tak Terduga					
	D. Belanja Transfer					
	JUMLAH		17.951.074.425	19.343.455.330	21.478.306.928	22.663.893.155
3	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan		18.837.546.503	19.636.660.106	22.012.103.700	23.539.763.503
	B. Pengeluaran Pembiayaan		17.852.055.133	19.216.934.330	21.478.306.928	22.663.893.155
	PEMBIAYAAN NETTO					
	SILPA		985.491.370	419.725.776	533.796.772	876.120.348

Dari tabel diatas dapat dilihat SILPA setiap tahunnya besar yang berasal dari belanja operasional penunjang , pelayanan SPM bidang sosial dan

bantuan sosial. Pada belanja operasional seperti Gaji dan tunjangan ASN, air, listrik. Pelayanan SPM bidang sosial seperti penyediaan permakanaan bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar di dalam panti sedangkan untuk bantuan sosial karena adanya penerima manfaat yang tidak melakukan realisasi atau penarikan bantuan yang diberikan.

Tabel 3.2
Neraca Dinas Sosial Pprovinsi Bengkulu tahun 2021-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Asset		11.319.614.978.10	11.446.135.978.10	10.080.288.491.10	9.822.142.176.10
	A. Aset Lancar		0	0	4.200.000	64.620.000
	B. Investasi jangka panjang					
	C. Aset tetap		11.319.614.978.10	11.446.135.978.10	10.076.088.491.10	9.757.522.176.10
	D. Aset Lainnya		0	0	0	0
	JUMLAH ASET		11.319.614.978.10	1.446.135.978.10	10.080.288.491.10	9.822.142.176.10
2	KEWAJIBAN		23.448.670	21.421.033	48.457.193	344.698.937
	A. Kewajiban Jangka Pendek		23.448.670	21.421.033	48.457.193	344.698.937
	B. Kewajiban jangka Panjang		0	0	0	0
	JUMLAH KEWAJIBAN		23.448.670	21.421.033	48.457.193	344.698.937
3	EKUITAS		11.296.166.308.10	11.424.714.945.10	10.031.831.298.10	9.477.443.239.10
	Ekuitas		11.296.166.308.10	11.424.714.945.10	10.031.831.298.10	9.477.443.239.10
	JUMLAH EKUITAS				10.031.831.298.10	9.477.443.239.10
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		11.319.614.978.10	11.446.135.978.10	10.080.288.491.10	9.822.142.176.10

Tabel 3.3
Proyeksi Kerangka Pendanaan tahun 2026-2030

NO	URAIAN	Baseline tahun 2025	TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	PENDAPATAN						
	A. Pendapatan Asli Daerah	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	B. Pendapatan Transfer	0	0	0	0	0	0
	C. lain-lain pendapatan daerah yang asli	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2	BELANJA						
	A. Belanja Operasi	19.335.208.300	15.643.506.805	19.206.842.200	18.726.842.200	19.101.842.200	19.656.8442.200
	B. Belanj Modal	58.959.000	135.000.000	1.975.000.000	3.550.000.000	3.550.000.000	3.050.000.000
	C. Belanja tak terduga	0	0	0	0	0	0
	D. Belanja Transfer	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA	19.394.167.300	15.778.506.805	21.181.842.200	22.276.842.200	22.651.842.200	22.706.842.200

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan sosial, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu menghadapi permasalahan baik pada tingkat strategis maupun operasional antara lain :

- a. Rehabilitasi sosial PPKS dalam panti belum optimal dan memenuhi standar kualitas SPM
- b. Kurangnya kemandirian sosial PPKS yang berkualitas
- c. Kurangnya peran serta PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- d. Kurangnya kerja sama penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan dunia usaha, BUMN, BUMD, dan Filantropi
- e. Keterbatasan SDM kompeten dan kapasitas masyarakat yang belum optimal
- f. Belum tersedianya data populasi secara akurat dan komprehensif
- g. Tata kelola dan Koordinasi Kabupaten / Kota belum maksimal

2.2.2 Isu Strategis

Secara definisi isu strategis merupakan permasalahan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan sehingga memerlukan perhatian khusus serta harus ditangani dengan pendekatan strategis agar tidak menghambat pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 tahun 2024 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Dinas Sosial melaksanakan tugas urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Sehingga Dinas Sosial memiliki peran penting dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Telaah Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia : Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 2025-2029 yaitu *“Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat”* yang berkelanjutan dan berkeadilan

dalam rangka mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045 untuk mewujudkan 2 (dua) dari 8 (delapan) Asta Cita Presiden yaitu :

- Misi 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
- Misi 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Kementerian Sosial maka diidentifikasi isu strategis Dinas Sosial Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

- Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
- Perlunya pembentukan panti bagi penyandang disabilitas terlantar dan gelandangan dan pengemis
- Kemiskinan ekstrem dan ketimpangan sosial belum tertangani optimal
- Belum optimalnya partisipasi lembaga sosial masyarakat dan dunia usaha
- Sinergi antar pemerintah dan Non Pemerintah
- Belum optimalnya mitigasi kebencanaan
- Kesetaraan gender
- Ketepatan sasaran penerima
- Minimnya integrasi data sosial

Tabel 2.2
Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rehabilitasi Sosial dasar kelompok rentan terlantar didalam panti	Rehabilitasi sosial PPKS dalam panti belum optimal dan memenuhi standar kualitas SPM	Sistem evaluasi kinerja yang kurang efektif		Renstra Kemensos RI		Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
						Perlunya pembentukan panti bagi penyandang disabilitas terlantar dan gelandangan

						dan pengemis
					RPJMD	Kesetaraan gender
Pemberdayaan dan peningkatan PPKS	Kurangnya kemandirian sosial PPKS yang berkualitas	Produktivitas PPKS	SDGs	Renstra Kemensos RI		Kemiskinan ekstrem dan ketimpangan sosial belum tertangani optimal
Memfasilitasi peran PSKS di kabupaten/kota	Kurangnya peran serta PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Keterbatasan SDM yang kompeten		Renstra Kemensos RI		Peningkatan pendamping kesejahteraan sosial
Mendorong kemitraan	Kurangnya kerja sama penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan dunia usaha, BUMN, BUMD	Program yang tidak berkelanjutan		Renstra Kemensos RI		Sinergi antar pemerintah dan Non Pemerintah
Peningkatan masyarakat rawan bencana	Edukasi dan kesadaran masyarakat rendah	Resiko bencana	Perubahan kritikal terhadap ekosistem Biodiversity loss dan gangguan ekosistem		Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana	Belum optimalnya mitigasi kebencanaan
Validasi dan pemutakhiran data	Belum tersedianya data populasi PMKS secara akurat dan komprehensif	Efektivitas penggunaan anggaran		Renstra Kemensos RI		Ketepatan sasaran penerima
Inovasi dan kolaborasi	Tata kelola dan Koordinasi Kabupaten / Kota dalam rangka inovasi dan kolaborasi belum maksimal	Kebijakan yang tidak terintegrasi			RPJMD	Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good and clean governance

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atas pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam rangka mendukung rencana pembangunan daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran OPD mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029 yaitu Visi “**Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan.**” Visi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Bengkulu sebagai provinsi yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut mencakup penghayatan akan nilai-nilai religius, pencapaian kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Ini menunjukkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan harmonisasi sosial dalam masyarakat.

Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 untuk mencapai:

- **Bengkulu Maju:** Provinsi Bengkulu telah mencapai tingkat pendapatan perkapita yang signifikan dalam GNI perkapita, kontribusi PDN Maritim, kontribusi PDB manufaktur dan berbagai aspek termasuk ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi dan teknologi, serta kualitas hidup masyarakat.
- **Religius:** Setiap warga Bengkulu memiliki sikap dan perilaku yang taat terhadap nilai-nilai agama, toleran dan hidup rukun.
- **Sejahtera:** Terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak secara ekonomi, tingkat pendidikan yang memadai, derajat kesehatan yang baik sehingga warga Bengkulu dapat hidup layak secara fisik maupun non fisik.

- **Berkelanjutan:** Upaya yang terencana dalam memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi untuk menciptakan warga provinsi Bengkulu yang bahagia.

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu mendukung salah satu misi utama yang ditetapkan adalah **Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan Rasa Aman**. Misi ketiga berfokus pada pencapaian kesejahteraan yang berkeadilan sosial dan demokratis dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam aspek kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, dan rasa aman. Untuk mewujudkan misi ini diperlukan upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan inklusif melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mendorong peningkatan pendapatan per kapita, Selain itu juga fokus pada pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan indeks modal manusia, termasuk pemberdayaan gender, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta peningkatan kualitas kehidupan keluarga.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut Dinas Sosial Provinsi Bengkulu telah menetapkan Visi, Misi dan tujuan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, maka perlu disusun tujuan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029 yaitu:

Tujuan 1 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif.

Tujuan ini sepenuhnya sejalan dengan Misi 3 RPJMD, karena menekankan peran aktif pusat dan daerah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat secara merata dan adil.

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu berupaya memastikan semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan kesempatan dan akses yang sama untuk mencapai kehidupan yang layak dan sejahtera. Dinas Sosial fokus pada program dan layanan agar tidak ada satupun kelompok yang tertinggal dalam proses pembangunan. Ada beberapa elemen kunci dari kesejahteraan sosial inklusif diantaranya:

- Pemerataan tanpa diskriminasi

Program dan kebijakan OPD harus dirancang untuk menjangkau semua kelompok, termasuk yang paling rentan seperti penyandang disabilitas, kelompok miskin, perempuan, anak-anak, lansia, dan masyarakat adat

- Partisipasi aktif

OPD perlu menciptakan ruang bagi kelompok terpinggirkan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program sehingga partisipasi mereka memastikan bahwa program yang dibuat relevan dan tepat sasaran.

- Akses yang setara

Semua anggota masyarakat harus memiliki akses yang sama terhadap pelayanan dasar dan perlindungan sosial. OPD harus menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi kelompok rentan mendapatkan akses tersebut.

- Pemberdayaan kelompok dan perlindungan sosial.

Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan dukungan lainnya. Serta menyediakan jaring pengaman sosial yang efektif untuk melindungi masyarakat yang tidak mampu atau yang terkena dampak ketidakstabilan ekonomi dan bencana.

Tujuan 2 Mewujudkan Tata kelola pemerintah yang profesional dan akuntabel

Mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional dan akuntabel lebih menekankan pada beberapa aspek yaitu transparansi dan keterbukaan terhadap public dengan menyediakan akses informasi yang relevan, akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas dan integritas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN), peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya termasuk anggaran dan aset secara optimal dan sesuai dengan peraturan agar dapat memberikan hasil dan manfaat yang maksimal dengan biaya yang minimal.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029 sepenuhnya terintegrasi dengan Misi 3 RPJMD, baik melalui Tujuan, sasaran, indicator maupun program yang dilaksanakan. Dokumen ini bukan hanya menjabarkan mandat teknis perencanaan, tetapi juga

menjadi instrumen strategis dalam mendukung terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan Rasa Aman

3.2 Sasaran renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, sasaran ditetapkan sebagai arah kerja yang terukur bagi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dalam mendukung pembangunan daerah secara konsisten dan efektif. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran ini menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan sekaligus memastikan keterkaitan dengan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Sasaran Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan 1-

Sasaran 1 adalah Meningkatkan pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang inklusif dan adaptif.

Sasaran ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan fungsi sosial, peningkatan kemandirian, dan peningkatan ketahanan sosial masyarakat secara keseluruhan. Fokusnya adalah pada semua kelompok masyarakat, termasuk yang rentan, agar mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar, meningkatkan kualitas hidup, dan memiliki kemandirian. Sasaran ini menekankan pada beberapa aspek antara lain :

- Pemenuhan kebutuhan dasar
Memastikan kebutuhan dasar kelompok masyarakat rentan seperti fakir miskin, anak terlantar, lansia terlantar, dan penyandang disabilitas terlantar, pengemis dan tuna sosial didalam panti dan korban bencana alam dan sosial terpenuhi.
- Rehabilitasi dan pemulihan fungsi sosial
Memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu yang mengalami disfungsi sosial agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.

- **Perlindungan dan jaminan**
Memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi individu dari berbagai resiko hidup dan memastikan jaminan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan eksklusi sosial.
- **Inklusivitas dan adaptif**
Pelayanan yang dirancang untuk menjangkau dan melayani semua orang, serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tantangan baru seperti bencana alam, pandemic atau krisis ekonomi.

Sasaran 2 Persentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Sasaran ini menekankan pada peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam usaha kesejahteraan sosial. Hal ini bukan hanya berfokus pada jumlah PSKS yang terlibat, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan kemandirian dalam membantu mengatasi masalah sosial. Beberapa poin yang ditekankan pada sasaran ini antara lain peningkatan kemampuan dan kapasitas.

Program pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan PSKS agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Pemberdayaan PSKS mendorong partisipasi aktif masyarakat setempat dalam merencanakan dan melaksanakan program kesejahteraan sosial, sesuai dengan pendekatan berbasis komunitas. Pada akhirnya, sasaran ini untuk mengukur sejauh mana pemerintah berhasil mengoptimalkan peran masyarakat sebagai mitra dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tujuan 2-

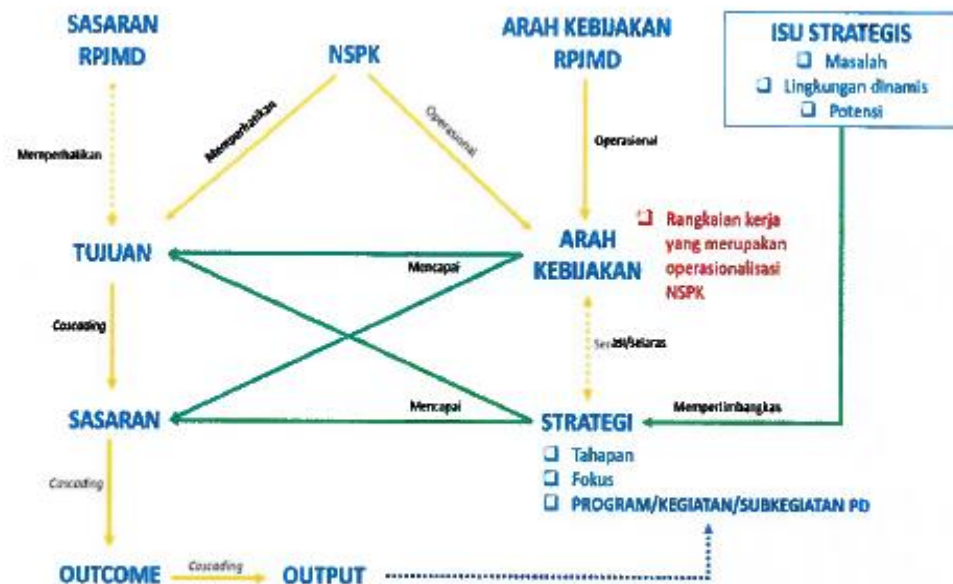
Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel

Pada sasaran ini, untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel menekankan pada beberapa prinsip dasar, yang merupakan bagian dari konsep *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) penekanannya meliputi

1. profesionalisme aparatur melalui pengembangan SDM, perubahan budaya kerja dengan mengubah pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada aturan menjadi focus pada kinerja pelayanan dan inovasi
2. Akuntabilitas kinerja dan keuangan
Dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dan pengelolaan keuangan yang transparan.
3. Reformasi birokrasi dan integritas
Memastikan setiap kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat mencegah korupsi dan mendorong komitmen kuat seluruh pegawai untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik
4. Partisipasi dan inovasi
Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan mendorong inovasi untuk meningkatkan efektifitas layanan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pencapaian sasaran ini juga ditandai dengan meningkatnya nilai SAKIP perangkat daerah, indeks profesionalisme ASN, serta kualitas layanan administrasi penunjang yang sesuai standar. Dengan menekankan pada aspek tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yaitu “Bengkulu maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Gambar
Konsep Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029



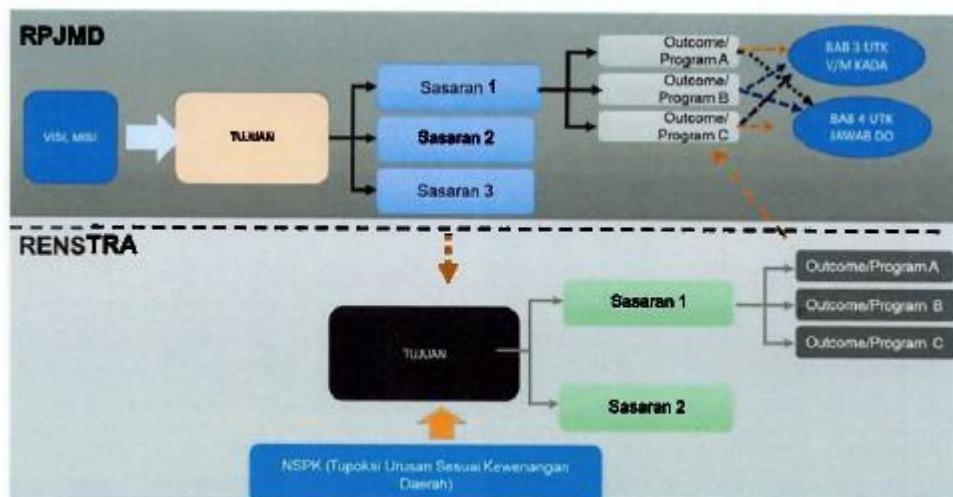
Secara rinci tujuan, sasaran, serta indikator kinerja dan target sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 3.2.1 berikut ini :

Tabel 3.2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator serta
Target Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2026-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Melaksanakan urusan pemerintahan dan urusan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif		Indeks kesejahteraan sosial	50.12	50.62	51.12	51.62	52.12	52,62
		Meningkatnya pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang inklusif dan adaptif	Persentase KPM yang mendapatkan manfaat pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang adaptif dan tepat sasaran	76.50%	76.70%	76.90%	77.100%	77.30%	77,50 %
			Persentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	60%	61%	62%	63%	64%	65
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Mewujudkan Tata kelola pemerintah yang profesional dan akuntabel	meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SaKIP Dinas Sosial	A	A	A	A	A	A
			Indeks Profesioanalitas ASN	78,24	78,24	78,24	78,24	78,24	78,24

Keselarasan Renstra Dinas Sosial dengan RPJMD Provinsi Bengkulu

Gambar
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra PD



Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Provinsi Bengkulu yang tertuang di dalam RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel 3.2.2. berikut.

Tabel 3.2.2
Keselarasan Renstra
Dinas Sosial dengan RPJMD Provinsi Bengkulu

Visi RPJMD	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Dinas Sosial	Sasaran Dinas Sosial
Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religius.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Mewujudkan Tata kelola pemerintah yang profesional dan akuntabel	meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
	Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan Rasa Aman	Meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial dan demokratis	Menurunnya kemiskinan	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang inklusif dan adaptif

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dapat dijabarkan sebagai berikut :

3.3.1 Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Rumusan strategi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dalam 5 (lima) tahun mendatang yang mengacu kepada strategi jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun strategi dari Dinas Sosial dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. *Peningkatan pelayanan rehabilitasi, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang inklusif dan adaptif*
 - Memperluas program rehabilitasi sosial didalam panti dan lembaga sosial untuk menjangkau lebih banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berfokus dalam pemenuhan kebutuhan dasar selama proses rehabilitasi bagi kelompok rentan seperti anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis .
 - Memperkuat / meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan
 - Membangun dan memperluas kemitraan / kolaborasi dengan lembaga, stakeholder yang melibatkan seluruh pihak dari pemerintah, Non-pemerintah untuk memperluas layanan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan
 - Perlindungan dan jaminan sosial melalui pengembangan program seperti PKH, Sembako dan bantuan sosial lainnya yang dapat beradaptasi dengan perubahan iklim dan bencana untuk melindungi kelompok rentan

- Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan seperti kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomis Produktif (UEP)
- Pemutakhiran data penerima manfaat sehingga tepat sasaran dan menjangkau seluruh yang membutuhkan
- Respon tanggap darurat cepat kepada korban bencana alam dan sosial

2. *Peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel*

Peningkatan profesionalisme pegawai, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana kerja yang modern dan inklusif. Dengan tata kelola yang baik dapat berjalan lebih efektif, transparan dan responsif.

Melalui kedua strategi tersebut, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu diharapkan mampu berperan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang sosial yang bertanggung jawab kepada Gubernur. Untuk memastikan implementasi strategi berjalan sistematis, ditetapkan penahapan pembangunan tahunan sebagai roadmap pelaksanaan prioritas. Penahapan ini berfungsi untuk menjaga kesinambungan pencapaian sasaran, memudahkan pengendalian serta memastikan setiap tahapan target renstra 2025-2029 dicapai secara bertahap, terukur dan selaras dengan arah pembangunan daerah maupun nasional.

Tabel 3.3.1
Penahapan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Tahap 1 (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan Fondasi dan Perencanaan : Membangun landasan kuat untuk strategi jangka panjang melalui Penguatan regulasi dan kebijakan, pemetaan kebutuhan dan data, peningkatan kapasitas SDM	Peningkatan kapasitas dan kolaborasi : Memperluas program dan membangun kemitraan yang lebih luas dengan mengembangkan kemitraan, integrasi layanan dan penguatan teknologi	Replikasi dan adaptasi terhadap dinamika : Mereplikasi program yang terbukti efektif, membangun mekanisme responsive terhadap perubahan kondisi, penguatan jaminan sosial, peningkatan kualitas layanan	Optimalisasi & evaluasi : Penguatan sistem dan memastikan berkelanjutan program dalam jangka panjang dengan penyempurnaan kebijakan dan program, inovasi, partisipasi masyarakat	Konsolidasi capaian & berkelanjutan : Mengonsolidasikan capaian kinerja dan menyiapkan fondasi menuju birokrasi selanjutnya

Dengan penahapan tersebut, strategi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu secara simultan setiap tahun dengan penekanan yang berbeda sesuai tahapan. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian sasaran tidak hanya terukur dari sisi output tahunan tetapi juga berkontribusi terhadap kondolidasi capaian kinerja menengah dan penyelarasan dengan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Bengkulu serta agenda menuju Indonesia Emas 2045.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

3.4.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman yang ditetapkan dalam melakukan setiap aktivitas dan kegiatan yang akan dilakukan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan yang diambil Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Penguatan regulasi / kebijakan dan kapasitas SDM sehingga dapat menyusun sistem pemetaan kebutuhan dan data yang akurat dan mutakhir.

Memperkuat regulasi yang mendukung pencapaian visi jangka panjang, melakukan identifikasi kebutuhan riil secara berkala dan mengumpulkan data yang akurat untuk menjadi dasar pengambilan keputusan dan evaluasi program secara objektif serta melakukan pelatihan atau pengembangan kompetensi bagi aparatur sipil Negara dan pemangku kepentingan lainnya agar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan.

2. Meningkatkan kerja sama strategis, mengintegrasikan layanan yang ada, dan memperkuat infrastruktur teknologi untuk mencapai tujuan bersama.

Dinas Sosial melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak yang formal maupun informal untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam mendukung program yang berkelanjutan dan memastikan layanan dapat diakses secara terpadu serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan program.

3. Penguatan kapasitas dan adaptabilitas melalui replikasi program sukses, peningkatan kualitas dan efisiensi layanan publik, serta perluasan jaminan sosial.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan mereplikasi program yang telah terbukti berhasil, pemerintah dapat mencapai tujuan yang digariskan secara lebih efektif dan efisien. Penguatan jaminan sosial dan peningkatan kualitas layanan publik juga merupakan bagian penting dari strategi pembangunan menuju Indonesia yang lebih maju serta mempercepat waktu penyelesaian, meningkatkan kompetensi petugas agar menjadi lebih proaktif dalam melayani.

4. Penyempurnaan kebijakan dan program, inovasi, serta partisipasi masyarakat

Hal ini dilakukan untuk memastikan program dapat beradaptasi dengan perubahan, lebih efektif dan efisien, serta didukung secara luas oleh komunitas sehingga dapat berjalan terus-menerus tanpa bergantung pada satu sumber pendanaan atau dukungan saja. Penyempurnaan kebijakan dan program dapat melalui evaluasi berkala, penyesuaian kebijakan dan penguatan kelembagaan. Untuk inovasi berkelanjutan dengan menciptakan program baru yang lebih efektif, efisien dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital yang dapat melibatkan peran masyarakat / komunitas dalam setiap tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi program.

5. Peningkatan kualitas SDM ASN, penguatan tata kelola pemerintahan dan SAKIP serta sinergi dan kolaborasi antar lembaga

Untuk mengonsolidasikan capaian kinerja dan menyiapkan fondasi menuju birokrasi masa depan melalui mengintegrasikan program-program antar kementerian/lembaga untuk efektivitas lebih baik, peningkatan kompetensi, menerapkan SAKIP yang berbasis hasil untuk memastikan setiap anggaran dan program menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, mengintegrasikan layanan-layanan pemerintah dalam satu digital yang mudah diakses,

memastikan setiap kebijakan lintas sektor selaras untuk mendukung program-program prioritas nasional.

Tabel 3.4
Arah kebijakan Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu 2025-2029

No	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NSPK Satu data Indonesia /SDI (Perpres No.39 tahun 2019)	Melakukan percepatan pengentasan kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan inklusif	Penguatan regulasi / kebijakan dan kapasitas SDM sehingga dapat menyusun sistem pemetaan kebutuhan dan data yang akurat dan mutakhir.	
2.	NSPK Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional /DTSEN (Permensos no.3 tahun 2025)			
3.	NSPK Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Penguatan kapasitas dan adaptabilitas melalui replikasi program sukses, peningkatan kualitas dan efisiensi layanan publik, serta perluasan jaminan sosial.	
4		Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal serta mempercepat pengembangan konektivitas guna menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.	Meningkatkan kerja sama strategis, mengintegrasikan layanan yang ada, dan memperkuat infrastruktur teknologi untuk mencapai tujuan bersama.	
5	NSPK pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Implementasi E-Governance yang Terintegrasi dengan Penguatan Kolaborasi	Penyempurnaan kebijakan dan program, inovasi, serta partisipasi masyarakat	
6	NSPK Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	antara Pemerintah, Lembaga Pengawasan Independen, dan Masyarakat untuk Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Pencegahan KKN	Peningkatan kualitas SDM ASN ,penguatan tata kelola pemerintahan dan SAKIP serta sinergi dan kolaborasi antar lembaga	

Tabel diatas memperlihatkan keterkaitan antara Norma,Standar,Prosedur dan Kriteria (NSPK), arah kebijakn RPJMD dan arah kebijakan Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. Dengan demikian setiap kebijakan yang dijalankan Dinas Sosial memiliki dasar normative yang kuat, mendukung pencapai target RPJMD.

BAB IV

PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Dalam rangka mencapai tujuan “*Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif* “ Dinas Sosial Provinsi Bengkulu menetapkan tujuh program utama pada periode 2025-2029, yaitu :

1. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini bertujuan untuk memberdayakan berbagai kelompok rentan melalui layanan dan dukungan sosial. Program ini meliputi rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar , PMKS lainnya diluar HIV dan NAPZA didalam panti.

2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini berfokus pada fasilitasi pemulangan dari titik debarkasi provinsi ke kabupaten / kota asal.

3. Pemberdayaan Sosial

Program yang bertujuan untuk membantu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar menjadi mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, peningkatan sarana dan prasarana, serta pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

4. Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bertujuan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, melindungi dari risiko sosial, dan mengurangi kemiskinan. Program-program ini dijalankan melalui berbagai skema, yang terbagi menjadi bantuan sosial, asuransi sosial, dan pilar suplemen seperti BPJS Kesehatan (JKN-KIS, PBI),Program Bantuan Sosial (PKH,Sembako,BLT dll), Program perlindungan lainnya (DTSEN, pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas)

5. Penanganan bencana

Program penanganan bencana di tingkat provinsi melibatkan serangkaian kegiatan yang terkoordinasi dan terintegrasi, mencakup fase pra-bencana (pencegahan dan mitigasi) melalui mitigasi bencana,edukasi dan sosialisasi serta peningkatan kesiapsiagaan , fase tanggap darurat (saat bencana terjadi) dengan menyediakan kebutuhan dasar bagi korban bencana dan

perlindungan khusus bagi kelompok rentan, dan yang terakhir fase pasca-bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi) melalui penyediaan pelayanan psikososial bagi korban bencana.

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini berfokus pada pemeliharaan/rehabilitasi, pengamanan taman makam pahlawan nasional provinsi.

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional dan infrastruktur perangkat daerah. Program ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti administrasi umum, perencanaan dan evaluasi kinerja, pengadaan serta pemeliharaan barang milik daerah, dan penyediaan jasa penunjang seperti layanan komunikasi, listrik, dan surat menyurat.

4.2 Uraian Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran serta arah kebijakan renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029, ditetapkan sejumlah program dan kegiatan strategis.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Adalah kegiatan yang mendukung kelancaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi. Program ini tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik, tetapi memastikan perangkat daerah dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Berikut rincian kegiatan yang relevan :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- h. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
- i. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- j. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
- k. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
- l. Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
- m. Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

- d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

1.4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- b. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
- d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
- e. Pengolahan Data Retribusi Daerah
- f. Penetapan Wajib Retribusi Daerah
- g. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- e. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- f. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- g. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
- h. Pemindahan Tugas ASN
- i. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- j. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- k. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- g. Penyediaan Bahan/Material
- h. Fasilitas Kunjungan Tamu
- i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- K Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pengadaan Alat Besar
- d. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- e. Pengadaan Mebel
- f. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- h. Pengadaan Aset Tak Berwujud
- i. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- J. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- k. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- e. Pemeliharaan Mebel
- f. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- h. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

B. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan bertujuan untuk memfasilitasi dan melindungi warga negara migran yang mengalami kekerasan. Program ini dijalankan oleh berbagai lembaga pemerintah, seperti Dinas Sosial, dan organisasi non-pemerintah. Fokus utama program ini mencakup pemulangan korban, penanganan kasus, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, kerja sama lembaga. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi

warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, terutama mereka yang rentan dan mengalami kekerasan. Berikut kegiatan yang mendukung program :

1.1 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

- a. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

C. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Program ini bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan kemampuan sosial individu yang mengalami disfungsi sosial, dengan fokus pada kelompok rentan seperti anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, Pengemis dan gelandangan dan PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA. Program ini mencakup berbagai layanan seperti dukungan pemenuhan kebutuhan dasar didalam panti seperti pengasuhan, permakanaan, sandang ,asrama, bimbingan fisik,sosial dan spiritual,alat bantu, Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari ,perbekalan kesehatan,pemulasaran dll. Berikut kegiatan yang mendukung program rehabilitasi sosial :

1.1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti

- a. Penyediaan Permakanan
- b. Penyediaan Sandang
- c. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
- d. Penyediaan Alat Bantu
- e. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
- f. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
- g. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
- h. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- j. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- i. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

- k. Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas
- l. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar
- m. Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
- n. Pemulasaraan
- o. Fasilitas Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan
- p. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar

1.2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti

- a. Pengasuhan
- b. Penyediaan Sandang
- c. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
- d. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
- e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
- f. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
- g. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- h. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- i. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- j. Penyediaan Permakanan
- k. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
- l. Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
- m. Pemulasaraan
- n. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar
- o. Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
- p. Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar

- q. Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti

1.3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

- a. Penyediaan Permakanan
- b. Penyediaan Sandang
- c. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
- d. Penyediaan Alat Bantu
- e. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
- f. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
- g. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
- h. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- i. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- j. Pemulasaraan
- k. Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar
- l. Akses ke Layanan Kesehatan Dasar
- m. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
- n. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar

1.4 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti

- a. Penyediaan Permakanan
- b. Penyediaan Sandang
- c. Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
- d. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
- e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
- f. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
- g. Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
- h. Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- h. Pemulangan ke Daerah Asal

- i. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
- j. Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis
- k. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- l. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- m. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis
- N Pemulasaraan

1.5 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti

- a. Penyediaan Permakanan
- b. Penyediaan Sandang
- c. Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
- d. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
- e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
- f. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
- g. Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
- h. Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- i. Pemulangan ke Daerah Asal
- j. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA
- k. Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS
- l. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- m. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- n. Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya

- o. Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah
- p. Pemulasaraan
- q. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

D. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Program perlindungan dan jaminan sosial adalah program pemerintah untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial dan kemiskinan, seperti saat terjadi bencana, krisis ekonomi, atau kerentanan sosial lainnya. Program ini mencakup berbagai bentuk bantuan dan jaminan, seperti bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan (contohnya PKH, Kartu Sembako, PIP, dan bantuan iuran JKN) dengan tujuan memberikan dukungan kepada mereka yang tidak bias mendapatkan penghasilan atau menghadapi kebutuhan tambahan karena berbagai alasan. Program ini juga memberikan fasilitasi pengangkatan anak antar WNI maupun oleh orang tua tunggal dengan tujuan dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak yang bersangkutan. Berikut kegiatan yang mendukung program perlindungan dan jaminan sosial:

1.1 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal

- a. Pengangkatan Anak antar WNI
- b. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal

1.2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

- a. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
- b. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- c. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
- d. Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial
- e. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai

- f. Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- g. Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin

E. PROGRAM PENANGANAN BANCANA

Program penanganan bencana berfokus pada perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Program ini meliputi berbagai upaya yang mencakup fase pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana. Berikut kegiatan yang mendukung yaitu:

1.1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

- a. Penyediaan Permakanan
- b. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
- c. Pelayanan Dukungan Psikososial
- d. Penyediaan Sandang
- e. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
- f. Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda
- g. Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana
- h. Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana
- i. Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah
- j. Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana
- k. Fasilitasi Pemetaan rawan konflik sosial
- l. Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)
- m. Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam

- n. Fasilitas Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana

F. PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pemberdayaan sosial adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan individu, keluarga, dan kelompok yang mengalami masalah sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mandiri. Dengan peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menjadi kewenangan provinsi yang berfokus pada Pemberdayaan berbagai pihak yang dapat berperan serta penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal berikut dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial seperti peningkatan kemampuan PSKS kelembagaan masyarakat, keluarga, tenaga kesejahteraan sosial di kecamatan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial lintas kab/kota. Rincian program dapat dilihat dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

1.1 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis

1.2 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi

- a. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
- B. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
- c. Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi
- d. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi
- e. Fasilitas Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan
- f. Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

- g. Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota
- h. Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi
- i. Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi
- J. Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- k. Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Lintas Kabupaten/Kota
- l. Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional

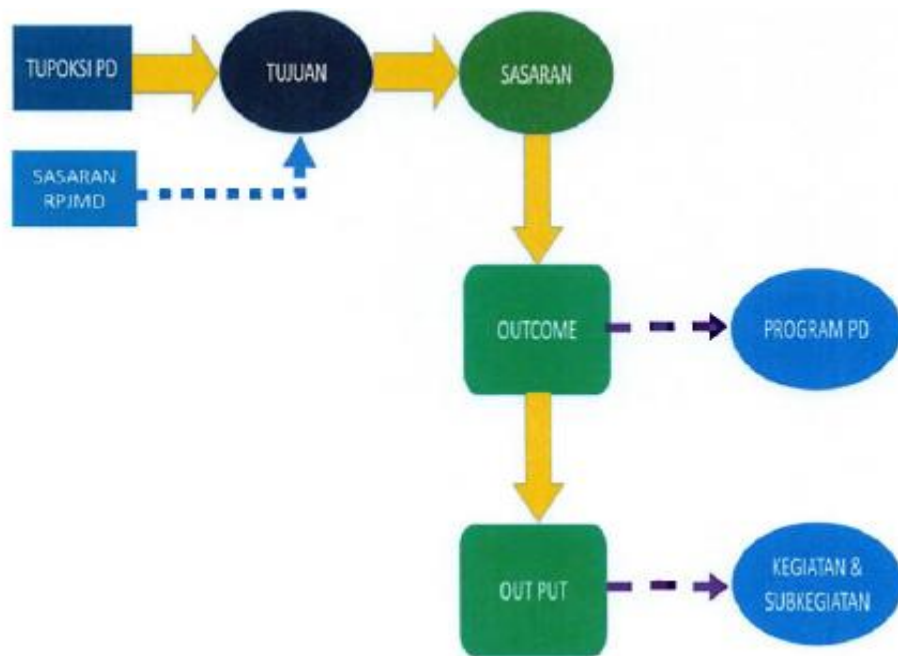
G. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) mencakup kegiatan pemeliharaan rutin dan kegiatan seremonial. Pemeliharaan bertujuan menjaga kebersihan dan keindahan TMP, seperti memotong rumput dan membersihkan area makam, seringkali melibatkan kerja bakti antara pemerintah daerah dan instansi terkait seperti dinas sosial dan militer. Sementara itu, kegiatan seremonial umumnya diadakan untuk memperingati hari-hari besar nasional, seperti ziarah kubur, tabur bunga, dan upacara bendera, yang bertujuan untuk mengenang jasa pahlawan serta menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan seperti patriotisme dan cinta tanah air. Berikut kegiatan yang mendukung program pengelolaan taman makam pahlawan :

1.1 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

- a. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
- b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
- c. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
- d. Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Gambar
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD



Penjabaran Program/Kegiatan untuk Dinas Sosial Provinsi Bengkulu selama tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Program / Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Melaksanakan urusan pemerintahn dan urusan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Meningkagkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif				Indeks kesejahteraan sosial	
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Meningkatnya pelayanan rehabilitasi, pemberdayaan sosial,perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang inklusif dan adaptif			Persentase KPM yang mendapatkan manfaat pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang adaptif dan tepat sasaran	
					Persentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	
			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan		Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
					Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	
				Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi ke daerah asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

				Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase Gelandangan dan Pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Indeks Peranan Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Penyediaan Permakanan
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Penyediaan Sandang
					Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Penyediaan Alat Bantu
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
				Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas
				Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar
				Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
				Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Pemulasaraan

					Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar di dalam Panti	Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
					Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Pengasuhan
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Penyediaan Sandang
					Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Penyediaan Permakanan
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
					Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	Pemulasaraan

					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar
					Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar
					Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagilanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Penyediaan Permakanan
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Penyediaan Sandang
					Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Penyediaan Alat Bantu
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
					Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Pemulasaraan
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar

					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar
					Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Penyediaan Permakanan
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Penyediaan Sandang
					Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
					Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti

				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
				Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
				Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Pemulangan ke Daerah Asal
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
				Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
				Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis
				Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	Pemulasaraan
			Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZATerlantar di dalam Panti	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Penyediaan Permakanan
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Penyediaan Sandang

					Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
					Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
					Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Pemulangan ke Daerah Asal

					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA
					Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS
					Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
					Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya

				Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah
				Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan provinsi	Pemulasaraan
				Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima manfaat terpenuhi kebutuhan dasar	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
				Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	
				Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	
				Peningkatan Indeks kebutuhan Dasar	
				Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi	

					Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	
				Terlaksananya pengangkatan anak oleh orang tua asuh/angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan provinsi	Persentase pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
					Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Pengangkatan Anak antar WNI
					Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
				Terpenuhinya KPM yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan provinsi	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
					Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
					Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial

				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai
				Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota	Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin
		Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana		Pesentase korban bencana alam, sosial dan/atau Non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	PROGRAM PENANGANAN BANCANA
				Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	
				Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	
			Terpenuhinya orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana pengungsi yang mendapatkan permakanan 3x1 hari	Persentase perlindungan Sosial Korban bencana Alam dan Sosial Provinsi	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
				Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Penyediaan Permakanan

				dalam masa tanggap darurat kewenangan provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Penyediaan Sandang
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
					Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda
					Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana
					Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana
					Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah
					Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana

				Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	Fasilitasi Pemetaan rawan konflik sosial
				Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keresasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Monitoring dan evaluasi kegiatan Keresasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)
				Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam
				Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	PEMBERDAYAAN SOSIAL
				Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	
				Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial dan atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	
				Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	

					Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Penerbitan rekomendasi Izin Sumbangan masyarakat dan undian gratis berhadiah Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
				meningkatnya kemampuan, partisipasi, peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Persentase pemberdayaan PSKS	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
					Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan	Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi

				Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan
				Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
				Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar	Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi	Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi
				Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi
				Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
				Jumlah Puskesmas Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program Graduasi	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Lintas Kabupaten/Kota
				Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional	Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional

		Meningkatnya tata kelola Taman makam Pahlawan		Persentase Taman makam Pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
			meningkatnya nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan,kesetiakawanan sosial dalam pengelolaan Taman makam pahlawan provinsi	Persentase Pengelolaan Taman Makam pahlawan Provinsi	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
				Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
				Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
				Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
				Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
		meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel		Nilai SaKIP Dinas Sosial	
				Indeks Profesioanalitas ASN	
		Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan,yang diukur melalui persentase pemenuhan jasa penunjang urusan		PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
				Persentase dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

		pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
				Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

				Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
				Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
				Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
				Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase terlaksanannya ADM. Keuangan perangkat daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
				Tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase terlaksanannya ADM. Barang Miliki Daerah pada perangkat daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Tersusunnya laporan/dokumen Adm. Pendapatan daerah pada perangkat daerah	Persentase terlaksanannya Adm. Pendapatan daerah pada perangkat daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				

					Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
					Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Pengolahan Data Retribusi Daerah
					Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Penetapan Wajib Retribusi Daerah
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
				Terlaksananya Adm. Kepegawaian perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Adm. Kepegawaian pada perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
					Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
					Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
					Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Pemindahan Tugas ASN

					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
					Terlaksananya Ad. Umum perangkat daerah	Persentase adm. Umum perangkat daerah yang dilaksanakan
						Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
					Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar
					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
				Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan

						Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Rencana program /kegiatan / Sub Kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program/Kegiatan/Sub Kegiatan indikator kinerja dan pendanaan indikatif untuk Dinas Sosial selama tahun 2025– 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3
Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		100%	100%	15,733,842,200	100%	21,181,842,200	100%	22,276,842,200	100%	22,651,842,200	100%	22,706,842,200
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan,yang diukur melalui persentase pemenuhan jasa penujang urusan pemerintahan daerah	Persentase dokumen perencanaan,pengan ggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase terlaksanannya ADM. Keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase terlaksanannya ADM. Barang Miliki Daerah pada perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase terlaksanannya Adm. Pendapatan daerah pada perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase terlaksanannya Adm. Kepegawaian pada perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase adm. Umum perangkat daerah yang dilaksanakan	100%	100%		100%		100%		100%		100%	

	Persentase pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase penyediaan jasa penunjang	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	100%	115,000,000	100%	550,000,000	100%	585,000,000	100%	615,000,000	100%	635,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	65,000,000	7 dokumen	75,000,000	8 dokumen	85,000,000	9 dokumen	100,000,000	10 dokumen	120,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	4 dokumen	0	4 dokumen	50,000,000	4 dokumen	50,000,000	4 dokumen	50,000,000	4 dokumen	50,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0	4 dokumen	50,000,000	4 dokumen	50,000,000	4 dokumen	50,000,000	4 dokumen	50,000,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	0	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0	0	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 dokumen	12 dokumen	25,000,000	17 dokumen	100,000,000	17 dokumen	100,000,000	17 dokumen	100,000,000	17 dokumen	100,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	4 laporan	50,000,000	4 laporan	50,000,000	4 laporan	50,000,000	4 laporan	50,000,000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	50 data	25,000,000	50 data	25,000,000	100 data	50,000,000	100 data	50,000,000	100 data	50,000,000
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	2 berita acara	25,000,000	2 berita acara	25,000,000	2 berita acara	25,000,000	2 berita acara	25,000,000
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	0	0	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	0	0	0	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	0	0	0	2 berita acara	25,000,000	2 berita acara	25,000,000	2 berita acara	25,000,000	2 berita acara	25,000,000

Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	JumlahSubtansiKoordinasiPeningkatanPartisipasiMasyarakatdalam PenyelenggaraanUrusanPemerintahan Daerah yang Diampu	0	0	0	2 substansi	50,000,000	2 substansi	50,000,000	3 substansi	65,000,000	3 substansi	65,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksanannya ADM. Keuangan perangkat daerah	100%	100%	13,941,842,200	100%	14,266,842,200	100%	14,566,842,200	100%	14,576,842,200	100%	14,876,842,200
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 orang	133 Orang/Bulan	13,850,722,200	135 Orang/Bulan	14,000,722,200	140 Orang/Bulan	14,300,722,200	140 Orang/Bulan	14,300,722,200	150 Orang/Bulan	14,600,722,200
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	0	-	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	20,000,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	12 dokumen	86,120,000	12 dokumen	96,120,000	12 dokumen	106,120,000	12 dokumen	116,120,000	12 dokumen	116,120,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	-	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	20,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	-	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	20,000,000
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	0	-	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	20,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	-	12 Dokumen	50,000,000	12 Dokumen	40,000,000	12 Dokumen	40,000,000	12 Dokumen	40,000,000

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	1 dokumen	5,000,000	4 dokumen	40,000,000	4 dokumen	40,000,000	4 dokumen	40,000,000	4 dokumen	40,000,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksanannya ADM. Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	100%	100%	5,000,000	100%	165,000,000	100%	230,000,000	100%	235,000,000	100%	235,000,000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	1 dokumen	-	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	1 dokumen	-	1 dokumen	35,000,000	1 dokumen	35,000,000	1 dokumen	35,000,000	1 dokumen	35,000,000
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	1 laporan	-	1 laporan	25,000,000	1 laporan	25,000,000	1 laporan	25,000,000	1 laporan	25,000,000
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0					1 dokumen	65,000,000	1 dokumen	65,000,000	1 dokumen	65,000,000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1 laporan	5,000,000	1 laporan	35,000,000	1 laporan	35,000,000	1 laporan	40,000,000	1 laporan	40,000,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1 laporan	-	1 laporan	25,000,000	1 laporan	25,000,000	1 laporan	25,000,000	1 laporan	25,000,000
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0	1 dokumen	-	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	20,000,000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksanannya Adm. Pendapatan daerah pada perangkat daerah	100%	100%	-	100%	75,000,000	100%	80,000,000	100%	85,000,000	100%	90,000,000

Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0	0	-	1 laporan	25,000,000	1 laporan	25,000,000	1 laporan	25,000,000	1 laporan	25,000,000
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	0	0	-	1 laporan	25,000,000	1 laporan	30,000,000	1 laporan	35,000,000	1 laporan	40,000,000
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	0	-	1 laporan	25,000,000	1 laporan	25,000,000	1 laporan	25,000,000	1 laporan	25,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksanannya Adm. Kepegawaian pada perangkat daerah	100%	0%	-	100%	520,000,000	100%	540,000,000	100%	550,000,000	100%	550,000,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	0	1 unit	55,000,000	1 unit	55,000,000	1 unit	55,000,000	1 unit	55,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	135 orang	100,000,000	140 orang	120,000,000	140 orang	130,000,000	150 orang	130,000,000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	0	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem	0	0	0	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000

	Informasi Kepegawaian											
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0	0	4 dokumen	100,000,000	4 dokumen	100,000,000	4 dokumen	100,000,000	4 dokumen	100,000,000
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0	0	0	3 orang	40,000,000	3 orang	40,000,000	3 orang	40,000,000	3 orang	40,000,000
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0	0	0	1 orang	25,000,000	1 orang	25,000,000	1 orang	25,000,000	1 orang	25,000,000
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	0	0	0	2 orang	35,000,000	2 orang	35,000,000	2 orang	35,000,000	2 orang	35,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	-	10 orang	75,000,000	10 orang	75,000,000	10 orang	75,000,000	10 orang	75,000,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	-	10 orang	25,000,000	10 orang	25,000,000	10 orang	25,000,000	10 orang	25,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	-	5 orang	15,000,000	5 orang	15,000,000	5 orang	15,000,000	5 orang	15,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase adm. Umum perangkat daerah yang dilaksanakan	100%	100%	330,000,000	100%	570,000,000	100%	700,000,000	100%	790,000,000	100%	890,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2 paket	15,000,000	2 paket	20,000,000	2 paket	30,000,000	2 paket	30,000,000	2 paket	30,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	2 paket	25,000,000	2 paket	50,000,000	2 paket	65,000,000	2 paket	65,000,000	2 paket	75,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	2 paket	25,000,000	2 paket	35,000,000	2 paket	45,000,000	2 paket	45,000,000	2 paket	55,000,000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	60,000,000	2 paket	70,000,000	2 paket	80,000,000	2 paket	90,000,000	2 paket	100,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 apjet	2 paket	25,000,000	2 paket	35,000,000	2 paket	45,000,000	2 paket	45,000,000	2 paket	50,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	1 dokumen	5,000,000	1 dokume n	10,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	20,000,000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	0	-	2 paket	70,000,000	2 paket	80,000,000	2 paket	90,000,000	2 paket	100,000,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 lapora n	1 laporan	20,000,000	1 laporan	30,000,000	1 laporan	40,000,000	1 laporan	50,000,000	1 laporan	50,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 lapora n	1 laporan	150,000,000	1 laporan	200,000,000	1 laporan	250,000,000	1 laporan	300,000,000	1 laporan	350,000,000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	-	1 dokume n	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1 dokumen	5,000,000	1 dokume n	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	35,000,000	1 dokumen	35,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan	100%	100%	25,000,000	100%	2,975,000,000	100%	3,550,000,000	100%	3,550,000,000	100%	3,050,000,000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0	1 unit	400,000,000	0	-	2 unit	1,000,000,000	1 unit	500,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	1 unit	1,000,000,000	0	-	1 unit	1,000,000,000	1 unit	1,000,000,000

Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0	0	0	1 unit	300,000,000	0	-	1 unit	400,000,000	1 unit	400,000,000
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	2 paket	400,000,000	1 paket	200,000,000	1 paket	250,000,000	1 paket	250,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	2 unit	25,000,000	14 unit	250,000,000	10 unit	200,000,000	10 unit	200,000,000	10 unit	200,000,000
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	0	1 unit	50,000,000	0	-	1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	-	1 unit	2,500,000,000	0	-	0	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	1 unit	500,000,000	1 unit	500,000,000	1 unit	500,000,000	1 unit	500,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	4 unit	75,000,000	6 unit	150,000,000	6 unit	150,000,000	6 unit	150,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang	100%	100%	867,000,000	100%	960,000,000	100%	975,000,000	100%	1,025,000,000	100%	1,030,000,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	5,000,000	1 laporan	10,000,000	1 laporan	15,000,000	1 laporan	15,000,000	1 laporan	20,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	330,000,000	1 laporan	350,000,000	1 laporan	360,000,000	1 laporan	360,000,000	1 laporan	360,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	0	1 laporan	-	1 laporan	50,000,000	1 laporan	50,000,000	1 laporan	50,000,000	1 laporan	50,000,000

	Perlengkapan Kantor yang Disediakan											
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	532,000,000	1 laporan	550,000,000	1 laporan	550,000,000	1 laporan	600,000,000	1 laporan	600,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	450,000,000	100%	1,100,000,000	100%	1,050,000,000	100%	1,225,000,000	100%	1,350,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	143 unit	143 unit	390,000,000	143 unit	400,000,000	143 unit	400,000,000	143 unit	425,000,000	143 unit	450,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	2	0	2 unit	50,000,000	2 unit	50,000,000	2 unit	50,000,000	2 unit	50,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	0	0	0	10 unit	50,000,000	10 unit	50,000,000	10 unit	50,000,000	10 unit	50,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 unit	10 unit	10,000,000	15 unit	50,000,000	15 unit	50,000,000	15 unit	50,000,000	15 unit	50,000,000
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0	0	-	0	-	1 unit	50,000,000	0	-	1 unit	50,000,000
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	50,000,000	1 unit	250,000,000	1 unit	300,000,000	1 unit	350,000,000	1 unit	400,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	-	1 unit	150,000,000	1 unit	150,000,000	1 unit	150,000,000	1 unit	150,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	-	1 unit	150,000,000	0	-	1 unit	150,000,000	1 unit	150,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						20,000,000		25,000,000		35,000,000		50,000,000
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan	-	-		10 orang	20,000,000	12 orang	25,000,000	15 orang	35,000,000	20 orang	50,000,000
	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani				100%		100%		100%		100%	
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	-	-	-	100%	20,000,000	100%	25,000,000	100%	35,000,000	100%	50,000,000

Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	10 orang	20,000,000	12 orang	25,000,000	15 orang	35,000,000	20 orang	50,000,000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		51%	86.25%	1,788,000,000	86.39%	4,678,300,000	86.53%	5,500,000,000	86.67%	5,552,175,000	86.82%	5,827,662,500
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	82,6%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	87,5%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase Gelandangan dan Pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	-	100%		100%		100%		100%		100%	
	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	53%	53.49%		53.99%		54.49%		54.99%		55.4900%	
	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	49.73 %	50.23%		50.73%		51.23%		51.73%		52.23%	
	Indeks Peranan Sosial	-										

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%	100%	65,000,000	100%	948,300,000	100%	1,138,300,000	100%	1,248,300,000	100%	1,298,300,000
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	117 orang	35 orang	25,000,000	80 orang	380,000,000	90 orang	450,000,000	100 orang	485,000,000	100 orang	520,000,000
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	30 orang	35 orang	15,000,000	80 orang	103,300,000	90 orang	103,300,000	100 orang	103,300,000	100 orang	103,300,000
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	0	0	-	40 orang	50,000,000	45 orang	50,000,000	50 orang	50,000,000	50 orang	50,000,000
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	35 orang	35 orang	5,000,000	40 orang	50,000,000	45 orang	65,000,000	50 orang	75,000,000	50 orang	75,000,000
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	0	35 orang	5,000,000	40 orang	50,000,000	45 orang	65,000,000	50 orang	75,000,000	50 orang	75,000,000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	0	35 orang	5,000,000	40 orang	20,000,000	45 orang	30,000,000	50 orang	40,000,000	50 orang	40,000,000
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	0	0	-	40 orang	15,000,000	45 orang	25,000,000	50 orang	35,000,000	50 orang	40,000,000

Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	0	0	-	10 orang	30,000,000	15 orang	40,000,000	15 orang	40,000,000	15 orang	40,000,000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	0	0	-	10 orang	30,000,000	15 orang	40,000,000	15 orang	40,000,000	15 orang	40,000,000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	0	0	-	10 orang	30,000,000	15 orang	40,000,000	15 orang	40,000,000	15 orang	40,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	0	0	-	2 kab/kota	30,000,000	2 kab/kota	30,000,000	2 kab/kota	30,000,000	2 kab/kota	30,000,000
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	0	0	-	50 orang	50,000,000	50 orang	50,000,000	50 orang	50,000,000	50 orang	50,000,000
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	0	0	-	10 orang	15,000,000	20 orang	30,000,000	30 orang	40,000,000	40 orang	50,000,000
Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	0	0	-	5 orang	15,000,000	5 orang	15,000,000	5 orang	15,000,000	5 orang	15,000,000

Facilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	0	0	-	20 orang	50,000,000	30 orang	75,000,000	40 orang	100,000,000	40 orang	100,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	0	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	30,000,000
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%	100%	510,000,000	100%	1,125,000,000	100%	1,224,200,000	100%	1,323,000,000	100%	1,520,000,000
Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	23 orang	23 orang	-	25 orang	15,000,000	27 orang	25,000,000	30 orang	30,000,000	35 orang	35,000,000
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	23 orang	23 orang	50,000,000	25 orang	65,000,000	27 orang	75,000,000	30 orang	100,000,000	35 orang	150,000,000
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	23 orang	23 orang	50,000,000	25 orang	300,000,000	27 orang	300,000,000	30 orang	300,000,000	35 orang	300,000,000
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	23 orang	23 orang	10,000,000	25 orang	25,000,000	27 orang	35,000,000	30 orang	40,000,000	35 orang	45,000,000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	23 orang	23 orang	10,000,000	25 orang	30,000,000	27 orang	35,000,000	30 orang	40,000,000	35 orang	45,000,000
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas	23 orang	23 orang	-	25 orang	20,000,000	27 orang	25,000,000	30 orang	30,000,000	35 orang	35,000,000

	Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi											
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	23 orang	23 orang	30,000,000	25 orang	50,000,000	27 orang	65,000,000	30 orang	80,000,000	35 orang	120,000,000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	5 orang	5 orang	5,000,000	5 orang	10,000,000	5 orang	10,000,000	5 orang	10,000,000	5 orang	10,000,000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	23 orang	23 orang	-	25 orang	10,000,000	27 orang	15,000,000	30 orang	18,000,000	35 orang	20,000,000
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	23 orang	23 orang	350,000,000	25 orang	385,000,000	27 orang	414,200,000	30 orang	450,000,000	35 orang	535,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	0	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000
Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	0	0	-	50 orang	50,000,000	50 orang	50,000,000	50 orang	50,000,000	50 orang	50,000,000
Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	0	0	-	1 orang	10,000,000	1 orang	10,000,000	1 orang	10,000,000	1 orang	10,000,000
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	0	0	-	50 orang	75,000,000	50 orang	80,000,000	50 orang	80,000,000	50 orang	80,000,000

	bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi											
Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	0	0	-	10 orang	50,000,000	10 orang	50,000,000	10 orang	50,000,000	10 orang	50,000,000
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	5 orang	0	-	5 orang	10,000,000	5 orang	10,000,000	5 orang	10,000,000	5 orang	10,000,000
Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	0	0	-	2 orang	10,000,000	2 orang	10,000,000	2 orang	10,000,000	2 orang	10,000,000
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%	100%	1,188,000,000	100%	1,755,000,000	100%	1,775,000,000	100%	1,950,000,000	100%	1,985,000,000
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	70 orang	70 orang	1,038,000,000	80 orang	1,185,000,000	80 orang	1,185,000,000	80 orang	1,335,000,000	80 orang	1,335,000,000
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	70 orang	70 orang	45,000,000	80 orang	65,000,000	80 orang	70,000,000	80 orang	70,000,000	80 orang	70,000,000
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	70 orang	70 orang	10,000,000	80 orang	200,000,000	80 orang	200,000,000	80 orang	200,000,000	80 orang	200,000,000

Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	0	10 orang	10,000,000	15 orang	35,000,000	15 orang	35,000,000	15 orang	40,000,000	20 orang	55,000,000
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	70 orang	70 orang	20,000,000	80 orang	40,000,000	80 orang	40,000,000	80 orang	50,000,000	80 orang	60,000,000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	70 orang	70 orang	20,000,000	80 orang	40,000,000	80 orang	40,000,000	80 orang	40,000,000	80 orang	40,000,000
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	0	70 orang	-	80 orang	20,000,000	80 orang	20,000,000	80 orang	20,000,000	80 orang	20,000,000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 orang	10 orang	10,000,000	10 orang	15,000,000	10 orang	20,000,000	10 orang	20,000,000	10 orang	20,000,000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	0	20 orang	-	20 orang	20,000,000	20 orang	20,000,000	20 orang	20,000,000	20 orang	20,000,000
Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	6 orang	12 orang	25,000,000	12 orang	25,000,000	12 orang	25,000,000	12 orang	25,000,000	15 orang	35,000,000
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	0	0	-	10 orang	10,000,000	10 orang	10,000,000	10 orang	10,000,000	10 orang	10,000,000
Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	0	70 orang	10,000,000	80 orang	40,000,000	80 orang	40,000,000	80 orang	40,000,000	80 orang	40,000,000

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	0	1 dokumen	-	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	30,000,000
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	0	0	-	20 orang	50,000,000	20 orang	50,000,000	20 orang	50,000,000	20 orang	50,000,000
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	100%	100%	25,000,000	100%	415,000,000	100%	922,500,000	100%	585,875,000	100%	544,362,500
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	0	0	0	50 orang	75,000,000	50 orang	82,500,000	60 orang	94,875,000	60 orang	104,362,500
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	0	0	0	50 orang	50,000,000	50 orang	50,000,000	60 orang	57,500,000	60 orang	50,000,000
Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	0	0	0	50 orang	30,000,000	50 orang	500,000,000	60 orang	100,000,000	60 orang	100,000,000
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	0	0	0	50 orang	25,000,000	50 orang	25,000,000	60 orang	28,750,000	60 orang	25,000,000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan	0	0	0	50 orang	25,000,000	50 orang	25,000,000	60 orang	28,750,000	60 orang	25,000,000

	Sosial Kewenangan Provinsi											
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	0	0	0	50 orang	25,000,000	50 orang	25,000,000	60 orang	28,750,000	60 orang	25,000,000
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	0	0	0	50 orang	25,000,000	50 orang	25,000,000	60 orang	32,500,000	60 orang	25,000,000
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	0	0	0	50 orang	25,000,000	50 orang	25,000,000	60 orang	28,750,000	60 orang	25,000,000
Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	0	20 orang	25,000,000	20 orang	20,000,000	50 orang	50,000,000	60 orang	57,500,000	60 orang	50,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	0	0	0	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	11,500,000	1 dokumen	10,000,000
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	0	0	0	10 orang	10,000,000	10 orang	10,000,000	10 orang	11,500,000	10 orang	10,000,000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	0	0	0	10 orang	15,000,000	10 orang	15,000,000	10 orang	17,250,000	10 orang	15,000,000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	0	0	0	50 orang	25,000,000	50 orang	25,000,000	60 orang	25,000,000	60 orang	25,000,000

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan	0	0	0	50 orang	50,000,000	50 orang	50,000,000	60 orang	57,500,000	60 orang	50,000,000
Pemulasaraan	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	0	0	0	1 orang	5,000,000	1 orang	5,000,000	1 orang	5,750,000	1 orang	5,000,000
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZATERlantar di dalam Panti	100%	100%	0	100%	435,000,000	100%	440,000,000	100%	445,000,000	100%	480,000,000
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	0	0	0	30 orang	130,000,000	30 orang	130,000,000	30 orang	130,000,000	30 orang	165,000,000
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	0	0	0	30 orang	30,000,000	30 orang	25,000,000	30 orang	25,000,000	30 orang	25,000,000
Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	0	0	0	30 orang	15,000,000	30 orang	15,000,000	30 orang	15,000,000	30 orang	15,000,000
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	0	0	0	30 orang	10,000,000	30 orang	10,000,000	30 orang	10,000,000	30 orang	10,000,000

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	0	0	0	30 orang	25,000,000	30 orang	25,000,000	30 orang	25,000,000	30 orang	25,000,000
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	0	0	0	30 orang	25,000,000	30 orang	25,000,000	30 orang	25,000,000	30 orang	25,000,000
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	0	0	0	30 orang	25,000,000	30 orang	25,000,000	30 orang	25,000,000	30 orang	25,000,000
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	0	0	0	30 orang	25,000,000	30 orang	25,000,000	30 orang	25,000,000	30 orang	25,000,000
Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	0	0	0	10 orang	20,000,000	15 orang	30,000,000	20 orang	35,000,000	20 orang	35,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	0	0	0	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	0	0	0	10 orang	10,000,000	10 orang	10,000,000	10 orang	10,000,000	10 orang	10,000,000

Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	0	0	0	10 orang	10,000,000	10 orang	10,000,000	10 orang	10,000,000	10 orang	10,000,000
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	0	0	0	30 orang	25,000,000	30 orang	25,000,000	30 orang	25,000,000	30 orang	25,000,000
Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	0	0	0	30 orang	25,000,000	30 orang	25,000,000	30 orang	25,000,000	30 orang	25,000,000
Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	0	0	0	30 orang	25,000,000	30 orang	25,000,000	30 orang	25,000,000	30 orang	25,000,000
Pemulasaraan	Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan	0	0	0	2 orang	10,000,000	2 orang	10,000,000	2 orang	10,000,000	2 orang	10,000,000

	NAPZA kewenangan provinsi											
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	0	0	0	10 orang	10,000,000	10 orang	10,000,000	10 orang	10,000,000	10 orang	10,000,000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		100%	100%	425,000,000	100%	5,016,000,000	100%	5,691,000,000	100%	6,676,000,000	100%	8,118,000,000
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima manfaat terpenuhi kebutuhan dasar	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi				100%		100%		100%		100%	
	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Peningkatan Indeks kebutuhan Dasar											
	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi											
	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergradiasi dari kemiskinan				100%		100%		100%		100%	
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Persentase pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak	100%	100%	35,000,000	100%	110,000,000	100%	125,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000

	oleh orang tua tunggal											
Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	10 orang	15 orang	35,000,000	20 orang	85,000,000	25 orang	100,000,000	30 orang	125,000,000	30 orang	125,000,000
Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	0	0	-	10 orang	25,000,000	10 orang	25,000,000	10 orang	25,000,000	10 orang	25,000,000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	53%	53%	390,000,000	53.50%	4,906,000,000	54%	5,566,000,000	54,5 %	6,526,000,000	55%	7,968,000,000
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	0	0	-	100 orang	1,200,000,000	150 orang	1,600,000,000	200 orang	2,200,000,000	250 orang	2,700,000,000
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	220 keluarga	150 orang	350,000,000	1500 orang	2,100,000,000	1500 orang	2,100,000,000	1500 orang	2,100,000,000	2000 orang	2,550,000,000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	0	10 kab/kota	15,000,000	10 kab/kota	150,000,000	10 kab/kota	150,000,000	10 kab/kota	150,000,000	10 kab/kota	150,000,000
Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial	Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	0	0	-	150 orang	150,000,000	150 orang	150,000,000	150 orang	150,000,000	175 orang	200,000,000

Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	0	1 dokuemn	25,000,000	1 dokuemn	30,000,000	1 dokuemn	40,000,000	1 dokuemn	50,000,000	1 dokuemn	50,000,000
Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota	0	0	-	100 orang	600,000,000	150 orang	850,000,000	200 orang	1,200,000,000	250 orang	1,450,000,000
Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi	0	0	-	1500 orang	676,000,000	1500 orang	676,000,000	1500 orang	676,000,000	2000 orang	868,000,000
PROGRAM PENANGANAN BANCANA		100%	100%	226,000,000	100%	1,120,000,000	100%	1,120,000,000	100%	1,475,000,000	100%	1,475,000,000
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Pesentase korban bencana alam, sosial dan/atau Non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase perlindungan Sosial Korban bencana Alam dan Sosial Provinsi	100%	100%	226,000,000	100%	1,120,000,000	100%	1,120,000,000	100%	1,475,000,000	100%	1,475,000,000

Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	0	51 orang	30,000,000	100 orang	100,000,000	100 orang	100,000,000	100 orang	150,000,000	100 orang	150,000,000
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	28 orang	51 orang	30,000,000	100 orang	100,000,000	100 orang	100,000,000	100 orang	150,000,000	100 orang	150,000,000
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	0	51 orang	26,000,000	100 orang	50,000,000	100 orang	50,000,000	100 orang	75,000,000	100 orang	75,000,000
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	0	51 orang	25,000,000	100 orang	100,000,000	100 orang	100,000,000	100 orang	150,000,000	150 orang	150,000,000
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	0	51 orang	70,000,000	100 orang	200,000,000	100 orang	200,000,000	100 orang	300,000,000	100 orang	300,000,000
Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	0	0	-	30 orang	55,000,000	30 orang	55,000,000	30 orang	55,000,000	30 orang	55,000,000
Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	0	0	-	50 orang	85,000,000	50 orang	85,000,000	50 orang	85,000,000	50 orang	85,000,000
Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	0	10 keluarga	10,000,000	100 keluarga	120,000,000	100 keluarga	120,000,000	100 keluarga	120,000,000	100 keluarga	120,000,000
Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan	0	0	-	100 orang	50,000,000	100 orang	50,000,000	100 orang	65,000,000	100 orang	65,000,000

	Bencana pada lokasi rawan bencana											
Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	0	0	-	100 orang	50,000,000	100 orang	50,000,000	100 orang	65,000,000	100 orang	65,000,000
Fasilitasi Pemetaan rawan konflik sosial	Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	0	0	-	2 daerah	50,000,000	2 daerah	50,000,000	3 daerah	60,000,000	3 daerah	60,000,000
Monitoring dan evaluasi kegiatan Keresasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keresasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	0	0	-	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000
Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	0	0	-	21 orang	50,000,000	21 orang	50,000,000	21 orang	50,000,000	21 orang	50,000,000
Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	0	1 desa/kelurahan	35,000,000	2 desa/kelurahan	60,000,000	2 desa/kelurahan	60,000,000	2 desa/kelurahan	100,000,000	2 desa/kelurahan	100,000,000
PEMBERDAYAAN SOSIAL		90%	90%	100,000,000	100%	685,000,000	100%	685,000,000	100%	690,000,000	94%	715,000,000
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	100%	100%		100%		100%		100%		100%	

	Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan sosial didalam panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA				100%		100%		100%		100%	
	Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial dan atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	60%	60%		60,3 %		60,5%		60,8%		70%	
	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang ,eningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penerbitan rekomendasi Izin Sumbangan masyarakat dan undian gratis berhadiah Lintas Daerah	0 doku men	0 dokumen	-	5 dokume n	15,000,000	5 dokumen	15,000,000	7 dokume n	20,000,000	10 dokumen	30,000,000

	Kabupaten/Kota yang diterbitkan											
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0 dokumen	0 dokumen	-	5 dokumen	15,000,000	5 dokumen	15,000,000	7 dokumen	20,000,000	10 dokumen	30,000,000
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase pemberdayaan PSKS	60%	60%	100,000,000	60,3 %	670,000,000	60,5%	670,000,000	60,8%	670,000,000	70%	685,000,000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	50 keluarga	100 keluarga	25,000,000	100 keluarga	50,000,000	100 keluarga	50,000,000	100 keluarga	50,000,000	100 keluarga	50,000,000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	40 lembaga	40 lembaga	50,000,000	40 lembaga	75,000,000	40 lembaga	75,000,000	40 lembaga	75,000,000	40 lembaga	75,000,000
Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan	0	0		20 lembaga	50,000,000	20 lembaga	50,000,000	20 lembaga	50,000,000	30 lembaga	65,000,000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	178	179 orang	25,000,000	179 orang	50,000,000	179 orang	50,000,000	179 orang	50,000,000	179 orang	50,000,000

Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	0	0	0	50 orang	80,000,000	50 orang	80,000,000	50 orang	80,000,000	50 orang	80,000,000
Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	0	0	0	100 orang	20,000,000	100 orang	20,000,000	100 orang	20,000,000	100 orang	20,000,000
Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar	0	0	0	4 kab/kota	75,000,000	4 kab/kota	75,000,000	4 kab/kota	75,000,000	4 kab/kota	75,000,000
Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi	0	0	0	5 orang	25,000,000	5 orang	25,000,000	5 orang	25,000,000	5 orang	25,000,000
Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	0	0	0	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	0	0	0	50 badan usaha	30,000,000	50 badan usaha	30,000,000	50 badan usaha	30,000,000	50 badan usaha	30,000,000
Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial	Jumlah Puskesmas Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan	0	0	0	4 Lembaga	50,000,000	4 Lembaga	50,000,000	4 Lembaga	50,000,000	4 Lembaga	50,000,000

(Puskesmas) Lintas Kabupaten/Kota	Berperan sebagai Hub Program Graduasi											
Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional	1	0	0	1 orang	65,000,000	1 orang	65,000,000	1 orang	65,000,000	1 orang	65,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		100%	100%	25,000,000	100%	700,000,000	100%	450,000,000	100%	450,000,000	100%	450,000,000
Meningkatnya tata kelola Taman makam Pahlawan	Persentase Taman makam Pahlawan nasional yang dikelola dengan baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Pengelolaan Taman Makam pahlawan Provinsi	100%	100%	25,000,000	100%	700,000,000	100%	450,000,000	100%	450,000,000	100%	450,000,000
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	0	0	-	1 dokumen	500,000,000	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	250,000,000
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 TMP	1 TMP	25,000,000	1 TMP	100,000,000	1 TMP	100,000,000	1 TMP	100,000,000	1 TMP	100,000,000
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	0	0	-	1 laporan	25,000,000	1 laporan	25,000,000	1 laporan	25,000,000	1 laporan	25,000,000
Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	0	0	-	100 orang	50,000,000	100 orang	50,000,000	100 orang	50,000,000	100 orang	50,000,000

Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	0	0	-	2 orang	25,000,000	2 orang	25,000,000	2 orang	25,000,000	2 orang	25,000,000
---	--	---	---	---	---------	------------	---------	------------	---------	------------	---------	------------

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan, yang diukur melalui persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
				Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
				Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
				Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
				Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
				Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
				Pengolahan Data Retribusi Daerah
				Penetapan Wajib Retribusi Daerah
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Pemulangan Pegawai yang Pensiun

				Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
				Pemindahan Tugas ASN
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
				Penyediaan Bahan/Material
				Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pengadaan Alat Besar
				Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
				Pengadaan Mebel
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya
				Pengadaan Aset Tak Berwujud
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

				Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
3	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang Disabilitas terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	
			Persentase Anak terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	
			Persentase Lanjut Usia terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	
			Persentase Gelandangan dan Pengemis terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	
			Persentase pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	
			Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	
			Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	
			Indeks Peranan Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar di dalam Panti
				Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Sandang
				Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
				Penyediaan Alat Bantu
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
				Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas
				Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlanjar
				Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas

				Pemulasaraan Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Pengasuhan Penyediaan Sandang Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Penyediaan Permakanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Pemulasaraan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
--	--	--	--	--

				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
				Pemulasaraan
				Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar
				Akses ke Layanan Kesehatan Dasar
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
				Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
				Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Sandang
				Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
				Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
				Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Pemulangan ke Daerah Asal
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
				Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
				Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis
				Pemulasaraan
				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
				Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Sandang
				Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

				Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemulangan ke Daerah Asal Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah Pemulasaraan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima manfaat terpenuhi kebutuhan dasar Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin Peningkatan Indeks kebutuhan Dasar Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pengangkatan Anak antar WNI Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin
5	PROGRAM PENANGANAN BANCANA	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Pesentase korban bencana alam,sosial dan/atau Non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Penyediaan Permakanan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Pelayanan Dukungan Psikososial Penyediaan Sandang Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana Fasilitasi Pemetaan rawan konflik sosial

				Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)
				Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam
				Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana
6	PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	
			Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan sosial didalam panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	
			Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial dan atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	
			Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	
			Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	
				Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
				Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi

				Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi
				Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan
				Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
				Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota
				Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi
				Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
				Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Lintas Kabupaten/Kota
				Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional
				Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya tata kelola Taman makam Pahlawan		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
				Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
				Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
				Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu 2025-2029 sangat ditentukan oleh sejauh mana perangkat daerah mampu mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan alat ukur yang jelas, terukur dan dapat dievaluasi secara periodik. Alat ukur tersebut diwujudkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

IKU untuk mengevaluasi sejauh mana suatu organisasi, unit kerja, atau individu berhasil mencapai tujuan strategisnya. IKU Dinas Sosial Provinsi Bengkulu berfungsi untuk mengendalikan, meningkatkan kinerja serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan. IKU Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
IKU Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks kesejahteraan sosial	Persentase	50.12	50.62	51.12	51.62	52.12	52.62	
1.1.1	Persentase KPM yang mendapatkan manfaat pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang adaptif dan tepat sasaran	Persentase	76.50	76.70	76.90	77.10	77.30	77.50	
1.1.2	Persentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase	60	61	62	63	64	65	
1.2.1	Nilai SaKIP Dinas Sosial	Numeric	A	A	A	A	A	A	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

IKK untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah atau kinerja sebuah organisasi. IKK digunakan untuk memantau pencapaian target kinerja menggunakan ukuran kualitatif atau kuantitatif.

Perbedaan IKU dan IKK adalah IKU berfokus pada hasil akhir (Outcome) dan pencapaian tujuan strategis organisasi, sedangkan IKK berfokus pada proses atau kegiatan operasional yang mendukung tercapainya IKU tersebut. IKK Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Gelandangan dan Pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau Non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persentase							
8.	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persentase							

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaannya dan apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain:

- 1) memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah
- 2) mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna sebesar-besarnya mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah
- 3) mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

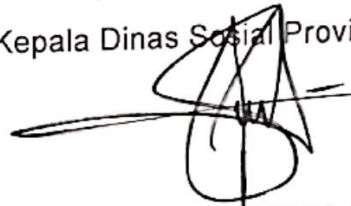
1. Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Bengkulu yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun lima tahun;
2. Sekretariat, Bidang Teknis dan UPT dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu harus mendukung pencapaian target Renstra, melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
3. Kerjasama dan koordinasi intensif dan berkelanjutan seluruh aparatur Sekretariat, Bidang Teknis dan UPT dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu untuk memastikan tercapainya target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029

Rencana Tindak lanjut yang akan dilakukan Dinas Sosial adalah :

1. Penyusunan Renja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2026 wajib berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029, untuk memastikan konsistensi, keselarasan dan berkelanjutan kebijakan, program dan kegiatan;

2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029, dilaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
3. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029 sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, 15 September 2025
Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu



SWIFANEDI YUSDA, S.Hut
Pembina TK.I
NIP. 197608152008041001